

**STRATEGI OPTIMALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA  
MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
(Studi Pada Desa Bram Itam Kanan Kec. Bram Itam Kab.Tanjung Jabung Barat)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**AK|BAR SAPUTRA JUMSAR  
EES 150580**

Dosen Pembimbing:

**Dr. Sucipto, MA  
Ahsan Putra Hafis, S.HI., M.EI**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Pembimbing I : Dr. Sucipto, MA**

**Pembimbing II : Ahsan Putra Hafis, S.HI., M.EI**

**Alamat** : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi  
Jl. Arif Rahman Hakim No.01 Telanaipura Jambi. (36122)

Jambi, 2020

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
di-  
JAMBI

### NOTA DINAS

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Akbar Saputra Jumsar yang berjudul "**Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Study pada Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I

**Dr. Sucipto, MA**  
**NIP. 19770514 2005 01 1010**

Pembimbing II

**Ahsan Putra Hafis, S.HI., M.EI**  
**NIP. 19810722 2005 01 1002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakin No.1 telanaipura jambi 36122 telp./fax: (0741) 65600 Website: febi-iainstsjambi.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-100/D.V/PP.00.9/ 7 /2020

Skripsi dengan judul “Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Study Pada Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat” yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Akbar Saputra Jumsar  
Nim : EES150580  
Tanggal ujian skripsi : 18 Mei 2020  
Nilai munaqasyah : 77,28 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sultha Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Pengujian  
Ketua Sidang

  
**Drs. H. Maulana Yusuf, M.Ag**  
NIP. 19631025 199203 1 005


Penguji I

  
**Dr. Novi Mubyarto, SE., ME**  
NIP. 19790309 200312 1 001

Rembimbing I

  
**Dr. Sucipto, MA**  
NIP. 1977051420050 1 001

Penguji II

  
**Bambang Kurnjawan, SP., ME**  
NIP. 19810426 201503 1 002

Pembimbing II

  
**Ahsan Putra Hafid, S.HI., M.EI**  
NIP. 19810722 2005 01 1002

Sekretaris Sidang

  
**M. Yunus, M.Si**  
NIP. 19920717 201801 1 002

Jambi, Juni 2020

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Dekan

  
**Dr. A.A. Mintah, M.Ag**  
NIP. 19730125 199603 1 001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  - Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Akbar Saputra Jumsar  
NIM : EES 150580  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Jl. Perum Hamsari Kel. Simpang IV Sipin Kec.  
Telanaipura Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Study pada Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat)** adalah hasil karya pribadi saya tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap untuk mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan di UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, 2020

Penulis,  
  
Akbar Saputra Jumsar  
EES 150580

METERAI TEMPEL  
DE0C3AHF360174282  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

❦ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. An-Nisa (4) 58”<sup>1</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>1</sup>Tim Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Qur'an Tafwid dan Tejermahan*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2008), 143.

## ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program pemberdayaan masyarakat Desa Studi pada Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1) Terdapat lima langkah dalam mengoptimisasikan pembangunan infrastruktur desa melalui program alokasi dana desa pada Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di antaranya: transparansi pembangunan, di mana masyarakat dapat mengetahui mekanisme pembangunan di Desa Bram Itam Kanan, pertanggungjawaban pembangunan, di mana perangkat desa selalu merespon pembangunan di Desa Bram Itam Kanan; responsibilitas, di mana pekerjaan yang dilakukan berdasarkan keputusan perangkat Desa Bram Itam Kanan; independensi, di mana tidak dipengaruhi oleh desa lain; dan kesetaraan dan kewajaran, di mana memberikan kesamaan hak pembangunan dan pelayanan; (2) Pembangunan desa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bram Itam Kanan Perspektif Ekonomi Islam dilakukan dengan prinsip tauhid, prinsip nubuwah, prinsip kepemilikan, prinsip keseimbangan, prinsip keadilan dan prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dan tolong-menolong (*ta'awun*).

**Kata Kunci :** Pembangunan Infrastruktur Desa Pemberdayaan Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## ABSTRACT

This thesis aims to uncover strategies for optimizing village infrastructure development through the community empowerment program in the Study Village in Bram Itam Kanan Village, Bram Itam District, Tanjung Jabung Barat District. This thesis uses a qualitative approach with data collection methods through observation, interviews, and documentation. Based on the research, the following results and conclusions are obtained: (1) There are five steps in optimizing the development of village infrastructure through the village fund allocation program in Bram Itam Kanan Village, Bram Itam District, Tanjung Jabung Barat Regency, including: transparency in development, where the community can know the development mechanism in Bram Itam Kanan Village, the responsibility for development, where the village apparatus always responds to development in Bram Itam Kanan Village; responsibility, where the work carried out is based on the decision of Bram Itam Kanan Village apparatus; independence, which is not influenced by other villages; and equality and fairness, which provide equal development and service rights; (2) Village development improves the economy of the Bram Itam Kanan village. The perspective of the Islamic Economy is carried out with the principle of monotheism, the principle of nubuwah, the principle of ownership, the principle of balance, the principle of justice and the principle of brotherhood (ukhuwah) and help-help (ta'awun).

**Keywords:** Village Infrastructure Development Community Empowerment



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil 'alamin*

Kuibaratkan karya kecilku ini bak serantai mawar yang wanginya akan tetap teringat sepanjang hayat, meski kelak raganya akan lekang terlengser waktu, dan kupersembahkan mawar ini untuk:

Ayahku terhebat Jumring, ilmu yang kauberikan dan mendidikku dengan titik-titik dan berubah menjadi kalimat sehingga kupergunakan untuk mencari ridho di jalan Allah SWT

Ibuku terindah Saripah yang mengasuhku dan memberikan warna pelangi di dalam hidupku hingga kujelajahi dunia yang begitu luas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah rabbil alamin*, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayahnya, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam semoga tetap telimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud Imam, Islam dan amal nyata yang *shalih likulli zaman wa makan*.

Skripsi ini diberi judul **“Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Study pada Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat)”** merupakan suatu kajian sistem informasi terhadap pembiayaan. Dan inilah yang diketengahkan dalam skripsi ini. Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh Bapak Dr. Sucipto, MA dan Bapak Ahsan Putra Hafis, S.HI., M.EI, selaku pembimbing satu dan dua, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Suaidi, MA., Ph. D, selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Bapak Prof. A.A. Miftah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi, Ibu Dr. Rafidah, SE., ME.I, selaku Wakil

Dekan I Bapak Dr. Novi Mubyanto, SE., ME, Wakil Dekan II, Bapak Dr. Sucipto., MA, Wakil Dekan III.

3. Bapak Ambok Pangiuk, S. Ag., M. Si, dan Bapak M. Yunus, M. Si selaku Ketua jurusan dan sekretaris jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
4. Bapak Dr. Sucipto, MA dan Bapak Mohammad Orinaldi, SE., M.S.Ak selaku pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
7. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan yang telah memabantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.
10. Anggota dan Senior IPMR Jambi.
11. Sahabat sahabati anggota, kader dan senior PMII Jambi.
12. Teman-teman seperjuangan 7 Pilar Ekonomi.
13. Teman-teman Rumah Tangga Harmonis.
14. Teman-teman seperjuangan.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita mohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Batasan Masalah.....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Penelitian Terdahulu .....	38
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b>	
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43
B. Jenis Penelitian.....	43
C. Jenis dan Sumber Data .....	45
D. Unit Analisis.....	46
E. Instrumen Pengumpulan Data .....	47
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Sistematika Penulisan.....	50
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Berdirinya Beram Itam Kanan.....	52
B. Letak Geografis .....	53
C. Sarana dan Prasarana .....	56
<b>BAB IV PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN</b>	
A. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur desa Melalui Program Alokasi Dana Desa Pada Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat	65
B. Pembangunan Desa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bram Itam Kanan Perspektif Ekonomi Islam.....	88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	104
B. Saran-Saran .....	105

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
CURRICULUM VITAE**

**DAFTAR SINGKATAN**

BUMDes : Badan Usaha Milik Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

: Subhanahu wa Ta'ala  
: Shallallahu 'alaihi wasallam  
: Sulthan Thaha Saifuddin  
: Universitas Islam Negeri  
: *Variance Inflation Factor*  
: Warga Negara Indonesia

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Desa yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 merupakan perwujudan dari pengakuan dan penghormatan Negara terhadap desa dengan keberagaman yang dimilikinya. Di dalam Undang-Undang Desa perihal pembangunan desa terdapat dua hal yang menjadi kunci utama yaitu yang disebut dengan Desa membangun dan Membangun Desa.<sup>2</sup> Desa Membangun berarti desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desanya sendiri. Pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerja bersama untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri.<sup>3</sup>

Desa Membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan, Oleh Desa, Dari Desa, dan Untuk Desa. Kemendes mempunyai tanggung jawab penuh dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa demi mewujudkan kemandirian desa dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.<sup>4</sup> Landasan digunakannya konsep *Good Governance* sebagai landasan nilai

---

<sup>2</sup> Djuni Pristianto, *Panduan Penyusunan RPJM desa*, (Jakarta: Yayasan Penabulu, 2015), hlm. 13.

<sup>3</sup> Badan Ramdan dkk, *Abcd Perencanaan desa Bacaan Khusus Untuk Kaum Perempuan dan Masyarakat Miskin*, (Jakarta: Inisiatif, 2014), hlm. 6.

<sup>4</sup> Zulfikri Amanda, "Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", <http://catatanpamong.blogspot.co.id/2014/01/undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang.html>, diakses pada 10 Februari 2017



penyelenggaraan pemerintahan, yang berorientasi pada pengembalian harga diri rakyat demi membangun kembali citra pemerintahan sebagai pelayan yang adil. Governance merupakan pengaturan, yang dalam konteks *Good Governance* ada yang menyebut tata pamong.

Upaya pembangunan desa yang menggunakan Alokasi Dana Desa maka pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan harus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama ditunggu datanya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian yang mempengaruhi kehidupan. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Indikator pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif.<sup>5</sup> Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam telah memiliki paradigma yang

---

<sup>5</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Refika Aditama: Bandung, 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

holistik dan strategis.<sup>6</sup> Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Salah satu pentingnya pemberdayaan dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal yang seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) dan unsur pemerintahan yang memang menggunakan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran. Pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat langsung memiliki hasil yang lebih efektif dan efisiensi dibandingkan dengan pembangunan desa dengan menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari desa lain. Salah satu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan bekerja secara kooperatif dan menumbuhkan rasa gotong royong sesama warga desa.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Mutthoriq dkk, "Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 2, No. 3

<sup>7</sup> Mutthoriq dkk, "Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 2, No. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat salah satunya berada di Desa Bram Itam Kanan, Desa Bram Itam Kanan merupakan salah satu desa yang perlu adanya pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, karena dilihat dari segi kondisi jalan dan kelengkapan lainnya masih mengalami kondisi yang memprihatinkan. Desa Bram Itam Kanan juga merupakan desa swasembada yang mana memiliki kemandirian lebih tinggi, mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya dibidang perkebunan dan tidak mengikat pada adat istiadat yang kental, selain itu adanya kelebihan dalam berbagai bidang baik dalam bidang ekonomi ataupun sosial. Meskipun telah menjadi desa swasembada Desa Bram Itam Kanan masih memerlukan perbaikan infrastruktur di bidang sarana dan prasarana untuk memperlancar berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bram Itam Kanan.

Dari hasil obeservasi penulis dapat ditemukan khususnya Pemerintah Desa Bram Itam Kanan berinisiatif untuk membangun BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk menjadi motor penggerak ekonomi di Desa Bram Itam Kanan. Dan kegiatan usaha BUMDes di desa ini adalah jual beli ikan. Kepala Desa Bram Itam Kanan terus mengupayakan usaha perikanan yang diharapkan mensejahterakan masyarakat Desa Bram Itam Kanan. Pemerintah Desa Bram Itam Kanan terus mengupayakan agar sektor usaha-usaha masyarakat dalam tingkatan usaha perikanan untuk terus berkembang. Hingga pemerintah desa menggunakan BUMDes untk mengatur mengelola Keramba Ikan di Desa Bram Itam Kanan yang berndampak pada pendapatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

masyarakat menjadi meningkat dikarenakan adanya kesetaraan harga dan juga kemudahan dalam mendapatkan pakan ikan.

**Tabel 1.1**  
Sumber Anggaran Dana Desa Bram Itam Kanan <sup>8</sup>

APBD Kabupaten/Kota	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 5.299.000,00
Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Pusat	Rp 778.463.000.000,00
Pendapatan Asli Desa melalui BUMDes	Rp 23.634.000,00
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 0.00
Alokasi Dana Desa	Rp 722.744.000,00
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan	Rp 0,00
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat	Rp 0,00

**Sumber:** Laporan Kerja Desa Bram Itam Kanan tahun 2018

Dalam penggunaan ADD masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat dari penyaluran ADD yang ada di Desa Bram Itam Kanan, sehingga ekonomi masyarakat belum sepenuhnya meningkat, dengan adanya ADD ini seharusnya mampu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan Desa Bram Itam Kanan. adapun dana Desa Bram Itam Kanan pada tahun 2018 dapat dilihat pada table di bawah ini:

<sup>8</sup> Dokumentasi data, di kantor Desa Bram Itam Kanan, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 26 Oktober 2019



**Tabel 1.2**  
Dana Desa Bram Itam Kanan <sup>9</sup>

					1,566,506,000.00		
1	pemeliharaan Kantor	6,780,000.00	ADD Tambahan	<b>ADD Tambahan</b>	471,911,000.00	bidang 1	6,780,000.00
2	perlengkapan Kantor		ADD Tambahan	109,725,000.00			
3	Honor Siskuedes Dan Profil		ADD Tambahan		936,971,750.00	Bidang 2	102,945,000.00
4	Informasi Desa/media		ADD Tambahan	<b>DD Perubahan</b>	936,971,750.00		
5	Makan Minum Rapat		ADD Tambahan	-			
6	SPPD		ADD Tambahan		89,000,000.00	Bidang 3	
7	Peningkatan Jalan / Rehab Jalan	65,945,000.00	ADD Tambahan				
8	Peningkatan Jalan / Rehab Jalan rt 3		<b>DD Perubahan</b>	jumlah	52,280,000.00	Bidang 4	
9	Tanaman Hedro Ponik	7,000,000.00	ADD Tambahan	109,725,000.00			
10	Normalisasi Parit Prt 2	10,000,000.00	ADD Tambahan				
11	Normalisasi Parit Prt 3	10,000,000.00	ADD Tambahan		1,550,162,750.00	Jumlah	
12	Normalisasi Parit RT 4	10,000,000.00	ADD Tambahan				
		109,725,000.00					16,343,250.00
		<b>109,725,000.00</b>	##				
		109,725,000.00					
		109,725,000.00	#				
					6,780,000.00	Perubahan B 1	
					102,945,000.00	Perubahan B 2	
					109,725,000.00		

**Sumber:** Laporan Kerja Desa Bram Itam Kanan tahun 2018

Pada pembangunan infrastruktur di Desa Bram Itam Kanan dalam penentuan program pembangunan yang akan dilakukan, pihak aparatur desa melakukan rapat internal dengan aparatur desa, memang dalam pengerjaanya dan juga mengundang masyarakat. Karena pihak aparatur desa melihat dan merasakan sendiri apa saja yang menjadi kekurangan dari infrastruktur yang ada di desa, oleh karena itu aparatur desa merasa pendapat mereka telah mewakili apa yang dibutuhkan masyarakat desa, seperti kondisi jalan yang masih terdapat kerusakan.

<sup>9</sup> Dokumentasi data, di kantor Desa Bram Itam Kanan, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 16 Oktober 2019

Dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Desa Bram Itam Kanan dalam pengerjaannya tidak sepenuhnya melibatkan peran dan kontribusi masyarakat, baik dari kelancaraan lalu lintas, dapat merangsang perekonomian yang ada, dan menyediakan infrastruktur yang memadai pada Desa Bram Itam Kanan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Nurdin selaku warga Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

Dalam pembangunan infrastruktur Desa Bram Itam Kanan dalam pengerjaannya tidak melibatkan peran dan kontribusi masyarakat di dalamnya, melainkan menggunakan tenaga kerja dari luar.<sup>10</sup> Dilihat dari mata pencaharian warga Desa Bram Itam Kanan sebagian bekerja sebagai pekerja bangunan atau buruh harian, dapat dipastikan bahwa mereka cukup profesional dalam melakukan pekerjaan pembangunan yang dilakukan tersebut. Mengingat pentingnya keterlibatan warga dalam pembangunan yang ada di desa menjadi faktor utama dalam pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan dan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan yang dilakukan di Desa Bram Itam Kanan. Dari Pra-Riset yang dilakukan oleh peneliti dapat ditulis beberapa hasil tentang.

Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dalam pelaksanaannya pemerintah Desa Bram Itam Kanan dalam melakukan pembangunan kurang melibatkan warga Desa Bram Itam Kanan yang sebenarnya memerlukan pekerjaan, melainkan menggunakan pekerja dari luar Desa Bram Itam Kanan yang menurutnya lebih murah dan mudah diatur, hal ini berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa menjadi menurun.

Oleh sebab itu, dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan judul skripsi dengan judul : **“Strategi Optimalisasi**

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Warga Desa Bram Itam Kanan, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 16 Oktober 2019





## **Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Study pada Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya pada latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program alokasi dana desa pada Desa Bram Itam Kanan, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pembangunan infrastruktur desa terhadap perekonomian masyarakat Desa Bram Itam Kanan, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

### **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya, maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas mengenai pembangunan infrastruktur Desa Bram Itam Kanan yang menggunakan program alokasi desa pada tahun 2018.

### **D. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini

1. Untuk mengetahui optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program alokasi dana desa pada Desa Bram Itam Kanan, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang pembangunan infrastruktur desa terhadap perekonomian masyarakat Desa Bram Itam Kanan, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### E. Manfaat Penelitian

Hasil peneleitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

#### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharpkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program pemberdayaan masyarakat desa.

#### b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi tentang strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa, sehingga mampu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat umumnya dan pemerintah desa khususnya.

#### c. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu Ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi di Fakultas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ekonomi dan Bisnis Islam dan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi yang berkaitan dengan ilmu Ekonomi Islam.

d. Bagi Pihak Lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur melalui program pemberdayaan masyarakat desa yang efisien, serta dapat memberikan masukan dan referensi mengenai strategi tersebut.

e. Sebagai Bahan Informasi Penelitian Selanjutnya

## F. Kerangka Teori

### 1. Kewenangan

Wewenang dalam konsep hukum publik merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kewenangan yang dimiliki, maka badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan atau tindakan pemerintah, ada dua fungsi berkaitan dengan kewenangan yaitu: fungsi pembuatan kebijakan (*policy marking*) yaitu kekuasaan yang menentukan tugas (*taakstelling*) dari alat pemerintahan atau kekuasaan yang menentukan politik negara dan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy exsecuting*) yaitu kekuasaan yang bertugas

untuk merealisasikan politik Negara yang telah ditentukan (*verwezeblikking van de taak*).<sup>11</sup>

Sukasmanto dan Dina Mariana menerangkan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.<sup>12</sup> Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya mempunyai 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan komformitas hukum. Komponen pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu haruslah mempunyai dasar hukum; sedangkan komponen komformitas, bahwa wewenang haruslah mempunyai standar.<sup>13</sup>

Bahasan mengenai keabsahan itu sendiri setara jika berbicara mengenai keberadaan hukum, sebagaimana pendapat Silahuddin bahwa hukum ada karena kekuasaan yang sah.<sup>14</sup> Kekuasaan yang sahlah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum, jadi hukum berdasar kekuasaan yang sah. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu

<sup>11</sup> Lutfiah Hanim, “*Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Kelurahan Dalam Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah (Studi Di Kelurahan Gadang Kota Malang)*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 3

<sup>12</sup> Sukasmanto dan Dina Mariana, *Modul Panduan Menyusun Kewenangan dan Perencanaan Desa*, (Yogyakarta: IRE Yogyakarta – CCES, 2015), hlm. 13

<sup>13</sup> Syamsi, “*Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Siswa Bimbingan Dan Konsultasi Belajar Al Qolam Bandarlampung*”, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Volume 5 Nomor 1, April, 2008, hlm. 25

<sup>14</sup> Silahuddin, *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan yang sumbernya dari peraturan perundang-undangan disebut dengan kewenangan konstitusionalisme yang merupakan sejumlah ketentuan hukum yang tersusun secara sistematis untuk menata dan mengatur stuktur dan fungsi lembaga-lembaga negara.

- a. Atribusi adalah kewenangan yang diperoleh oleh organ pemerintah secara langsung dari peraturan perundang-undangan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>15</sup>

Pada atribusi terjadi pemberian yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintah baru. Dapat diberi uraian bahwa ketentuan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan yang disengketakan itu mungkin menyebutkan dengan jelas badan atau pejabat tata usaha negara yang diberi wewenang pemerintah, jadi dasar wewenang tersebut dinamakan bersifat atributif. Delegasi yaitu terjadinya pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan tata usaha negara lainnya.<sup>16</sup> Dengan demikian, suatu delegasi selalu

<sup>15</sup> Badan Ramdan dkk, *ABCD Perencanaan desa Bacaan Khusus Untuk Kaum Perempuan dan Masyarakat Miskin*, (Jakarta: Inisiatif, 2014), hlm. 6.

<sup>16</sup> Basseng, *Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015), hllm. 27.

didahului oleh adanya atribusi wewenang, adalah sangat penting untuk mengetahui apakah suatu badan atau jabatan tata usaha negara itu pada waktu mengeluarkan suatu keputusan yang berisi suatu pendelegasian wewenang berdasarkan suatu wewenang pemerintah atributif yang sah atau tidak. Dalam hal mandat, maka tidak terjadi perubahan apa-apa mengenai distribusi wewenang yang telah ada, yang ada hanya suatu hubungan intern, pemberi mandat menugaskan penerima mandat untuk atas nama mandans melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan-keputusan tata usaha negara tertentu. Jadi pada mandat, wewenang pemerintah tersebut dilakukan oleh mandataris atas nama dan tanggung jawab mandans.<sup>17</sup>

## 2. Konsep Strategi

Strategi adalah pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan sadaran, maksud atau tujuan dan menghasilkan suatu kebijakan serta merencanakan untuk pencapaian tujuan serta memperinci apa yang ingin dicapai. Strategi merupakan suatu proses yang dalam banyak hal tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan dimana tempat terjadinya saling berhubungan erat dengan kehidupan nyata, tetapi dapat dipisah dengan tujuan analisis.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Ihsanuddin, “Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir”, Jurnal Universitas Negeri Padang, 2011, hlm. 7

<sup>18</sup> Siska Dewi Agustin, “Peran BPD (BPD ) Dalam Proses Sinergisitas Dengan Kepala desa Untuk Membangun pemerintahan Yang Demokratis Di desa Matekan kecamatan Besuk kabupaten Probolinggo”, Jurnal Universitas Negeri malang, 2011, hlm. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



### 3. Definisi Infrastruktur

Infrastruktur merupakan berbagai fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh agen-agen publik yang bertujuan memenuhi tujuan sosial dan ekonomi serta fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal transportasi, tenaga listrik, penyediaan air, dan pelayanan-pelayanan lainnya yang serupa.<sup>19</sup>

### 4. Definisi Desa

Istilah desa berasal dari bahasa *Swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* atau *village* yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban).

Bintarto yang memandang desa dari aspek geografis mendefinisikan desa sebagai “suatu hasil perwujudan antara kegiatan sekelompok orang manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi sosial ekonomi, politisi, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga hubungannya dengan daerah lain.”

<sup>19</sup> Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.

Kuntjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap disuatu daerah, sedangkan Bargel mendefinisikan desa sebagai setiap pemukiman para petani.

## 5. Penerapan *Good Governance*

*Governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin masyarakat dan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai pemerintahan. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Good Governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. Menurut Melisa Olivia Mamarimbing menyatakan bahwa;

*Good Governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.<sup>20</sup>

Dari kutipan di atas dapat dicermati bahwa *Good Governance* merupakan suatu capaian yang perlu direncanakan oleh pemangku kebijakan dalam pemerintahan sehingga tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari tindak kejahatan korupsi. Demi terciptanya *Good Governance* dalam pemerintahan lebih-lebih pemerintahan dalam lingkup masyarakat maka perlu diterapkan dan

<sup>20</sup>Melisa Olivia Mamarimbing “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Di Desa Tateli I Kec. Mandolang)”, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ditingkatkan dengan cara menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.<sup>21</sup>

Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh pemerintahan (Pemilik wewenang, Komisaris, dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas pemerintahan guna mewujudkan nilai pemerintahan dalam jangka panjang dengan cara memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.<sup>22</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam hadits riwayat Bukhori Muslim sebagai berikut :

اللَّهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْفُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَارْفَقْ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ

Artinya: “Ya Allah, siapapun yang menjadi penguasa atas umatku pada suatu urusan, lalu mempersulit mereka, maka berilah kesulitan atasnya, dan siapapun yang menjadi penguasa atas umatku pada suatu urusan, lalu bersikap lembut kepada mereka, maka mudahkanlah urusannya.” (HR. Muslim).<sup>23</sup>

Dari hadis di atas dapat dicermati bahwa seorang pemimpin harus memberi panutan kepada bawahannya yang diperuntukkan untuk

<sup>21</sup>Thomas, “Good Governance dan Penerapannya di Indonesia”, Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra Surabaya, 2013, hlm. 6.

<sup>22</sup>Rista Dewi Anggraini, “Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya”.

<sup>23</sup> Friman Hidayat marwadi, “Masâil Asasiyyah Wathaniyyah”, <https://almarwadi.wordpress.com/2013/03/31/keputusan-komisi-a-ijtima-ulama-komisi-fatwa-majelis-ulama-indonesia-se-indonesia-iv-tahun-2012/>, diakses pada 12 Spetember 2017.

memberikan kelancaran dan kemudahan dalam mencapai pemerintahan yang baik, karna bila seorang pemimpin memudahkan bawahannya untuk mendapatkan sesuatu maka ia akan mendapatkan kemudahan dalam memimpin bawahannya.<sup>24</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, *Good Governance* secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *Good Governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Penerapan *Good Governance* di pemerintahan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi suatu pemerintahan yang ingin mengembangkan dan memajukan daerahnya masing--masing, seperti menambah wawasan baru.

## 6. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Di setiap pemerintahan harus memastikan bahwa prinsip *Good Governance* diterapkan pada setiap birokrat (pejabat) dan di semua jajaran. Terdapat prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.<sup>25</sup> Berikut adalah penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut;

<sup>24</sup>Mustafa Abubakar, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011, Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, (Jakarta, Badan Usaha Milik Nega, 2011), hlm. 3.

<sup>25</sup>Bediono, *Pedoman Umum Good Governance Indonesia*., hlm. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### a. Keterbukaan (*Transparency*)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.<sup>26</sup> Transparansi atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga.<sup>27</sup> Itu artinya transparansi juga dapat dikatakan sebagai suatu komitmen untuk mengungkapkan secara jujur, terbuka dan komprehensif tentang informasi yang dibutuhkan oleh publik. Di dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan kesaksian, sebagaimana firman Allah SWT. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat At Taubah:119.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.<sup>28</sup>

Selanjutnya Allah memperingatkan dari kesaksian dusta dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan:72

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرٰمًا

<sup>26</sup>Rista Dewi Anggraini, “Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya”, jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 2011, hlm. 7.

<sup>27</sup>Dedi Harianto, “Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Perpustakaan (Ruu Perpustakaan)”, [http://kelembagaan.perpusnas.go.id/Digital\\_Docs/homepage\\_folders/activities/highlight/ruu\\_perpustakaan/naskah\\_akademis.htm](http://kelembagaan.perpusnas.go.id/Digital_Docs/homepage_folders/activities/highlight/ruu_perpustakaan/naskah_akademis.htm), diakses pada 01 September 2016.

<sup>28</sup>At Taubah, (119)



Artinya: “Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya”.<sup>29</sup>

Selama dalam pihak pelaksana perhitungan akhir dan pembuat neraca keuangan bersifat jujur, maka selama itu pula ia menjadi orang kepercayaan.<sup>30</sup> Transparansi kondisi keuangan dan kinerja pegawai desa merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan informasi (asymmetric information) sehingga publik dan para pelaku pasar dapat memberikan penilaian yang wajar dan dapat mendorong terciptanya disiplin pasar (market discipline)”. Aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan. Setidaknya ada 8 aspek yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan
- 2) Kekayaan pejabat *public*
- 3) Pemberian penghargaan
- 4) Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
- 5) Kesehatan
- 6) Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan public
- 7) Keamanan dan ketertiban
- 8) Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat
- 9) Responsif *Responsiveness*

<sup>29</sup>Al-Furqan, (72)

<sup>30</sup>Yusup Al Subailly, Fiqih Perbankan Syariah, Pengantar Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ilmu Moderen, (Universitar Islam Imam Muhammad Daud Fakultas Syariah, 2014), hlm. 5.

<sup>31</sup>Yenny, “Prinsip-Prinsip Good Governance”, hlm. 203.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu pemerintah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemerintah dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.<sup>32</sup> Pedoman pokok dalam pelaksanaan prinsip Akuntabilitas ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ pemerintah dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- 2) Pemerintah harus meyakini bahwa semua organ pemerintah dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Governance*.
- 3) Pemerintah harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Pemerintah harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran pemerintah yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran

<sup>32</sup>Lukas William Andypratama dan Ronny H. Mustamu, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Perusahaan Keluarga : Studi Deskriptif Pada Distributor Makanan”, Jurnal AGORA, Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra, 2013, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

- 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ pemerintah dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

c. **Responsibilitas (*Responsibility*)**

Pemerintah harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.<sup>33</sup> Pedoman pokok dalam pelaksanaan prinsip Responsibilitas ini adalah sebagai berikut :

- 1) Organ pemerintah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan pemerintah (*by-laws*).
- 2) Pemerintah harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar pemerintah dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. **Independensi (*Independency*)**

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Governance*, pemerintah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing

<sup>33</sup>Bediono, *Pedoman Umum Good Governance Indonesia*, hlm. 6.

organ pemerintah tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok dalam pelaksanaan prinsip Independensi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masing-masing organ pemerintah harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- 2) Masing-masing organ pemerintah harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

e. **Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)**

Dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah harus senantiasa memperhatikan kepentingan bersama berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.<sup>34</sup> Pedoman pokok dalam pelaksanaan prinsip Kesetaraan dan Kewajaran ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan pemerintah serta membuka akses

<sup>34</sup>Bediono, *Pedoman Umum Good Governance Indonesia*, hlm. 5.

terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

- 2) Pemerintah harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- 3) Pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik

Dari penjelasan di atas bahwa, dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* yang ada diharapkan pemerintah bisa berjalan secara efektif dan efisien, sehingga kinerjanya menjadi optimal. Penulis akan menggunakan teori ini untuk menemukan bagaimana strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program alokasi dana desa pada Desa Bram Itam Kanan, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## 7. Konsep Pembangunan dalam Islam

Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas sosial. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.<sup>35</sup>

Sedangkan Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pemikiran, gagasan, paradigma yang bersumber dari Al Qur'an dan hadis, serta ijtihad ulama' dengan metode (manhāj) yang dipilih oleh ulama' dalam menentukan nilai-nilai dasar Ekonomi. Menurut Abdul Rahman Ghazaly dkk ekonomi Islam adalah usaha-usaha yang bertujuan menciptakan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan hadis, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan dan tanpa menimbulkan ketidakseimbangan sumber daya alam dan sumber daya manusia.<sup>36</sup>

Sebagai sebuah ajaran yang bersifat Rabbaniyyah yang tidak akan lekang oleh zaman dan senantiasa menjadi solusi atas segala bentuk tantangan zaman, Islam menawarkan konsep pembangunan masyarakat yang bermula pada pembangunan karakter pribadi-pribadi manusia yang dalam teori pembangunan atau pemberdayaan masyarakat dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada manusia. Dalam firman Allah QS. al-Anfal ayat 53:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

<sup>35</sup> Nur Sahida Mohammad dkk, "Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awal", Jurnal Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VIII, ISSN: 2231-962X, 2013, hlm. 362

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Artinya: *yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>37</sup>

Sama halnya seperti penjelasan QS. al-Anfal ayat 53 bahwasanya perubahan yang terjadi pada diri manusia merupakan upaya yang ada dalam diri manusia tersebut untuk merubahnya sendiri. Manusia yang akan berubah dan berusaha akan dimudahkan Allah dalam segala urusannya. Melalui pemberdayaan masyarakat ini membukakan jalan bagi hambanya untuk dapat merubah keadaannya menjadi lebih baik lagi.

Pembangunan dalam Islam diartikan sebagai menerima pembangunan asing, barat dan timur yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat dan menolak apa-apa yang berbahaya berteraskan kepada nilai-nilai Islam. Muhammad Akhir dan Hailani menyatakan definisi pembangunan ialah pembangunan Islam adalah berlandaskan kepada orientasi nilai dengan perhatian untuk meningkatkan kebijakan umat Islam dari semua aspek (kebendaan dan kerohanian) untuk mencapai kemaslahatan dan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Definisi pembangunan, mewujudkan kehidupan yang tentram dan sejahtera kepada manusia, yaitu kehidupan yang memenuhi keperluan rohani dan jasmani manusia.

Pembangunan Islam adalah pembangunan insaniah manusia sendiri. Pembangunan yang diketengahan Islam adalah pembangunan yang datangnya dari pada kesadaran yang tinggi dari umatnya yang saling

---

<sup>37</sup> al-Anfal (8): 53



bekerjasama dan bukannya datang daripada satu kelompok yang kecil.

Konsep pembangunan dalam Islam ialah sebagai berikut:

- a. Pembangunan dalam Islam adalah keupayaan bersama.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Pembangunan haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di dalam QS. Al Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى  
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>38</sup>*

Ayat ini menjelaskan tentang pembangunan ini adalah mengenai bagaimana kita membangun desa dalam hal gotong royong

<sup>38</sup> QS. Al Maidah (2): 2

dan tolong menolong, yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena dengan tolong menolong dan gotong royong maka pekerjaan yang sangat sulit akan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dikerjakan dengan mudah. Islam memberikan ruang kepada manusia mencapai kesenangan dan kejayaan di dunia, usaha mengejar kemewahan dunia tidak boleh dipisahkan dari aspek akhlak yang bertindak selalu mengawas, demi mengelakkan kerusakan kepada manusia itu sendiri.

Garis panduan untuk melaksanakan pembangunan dalam Islam:

- 1) Kita tidak boleh melupakan tugas yang telah diwajibkan dari Allah.
- 2) Tidak boleh melupakan kedudukan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Segala yang dimiliki adalah hak Allah dan apa yang dimiliki adalah amanah.
- 3) Mesti menanam nilai-nilai agama dan akhlak.
- 4) Menjadikan pembangunan sebagai sumber kekuatan dan bukan sebagai sumber kelemahan.
- 5) Memastikan pembangunan tersebut mencapai tujuan dan nilai-nilai akhlak yang tidak menyalahgunakan kuasa.<sup>39</sup>

Kegiatan dilakukan dalam pembangunan masyarakat Islam terdiri dari kegiatan pokok berupa transformasi dan pelebagaan ajaran Islam ke dalam realitas Islam, sebagai berikut:

- a) Penyampaian konsep Islam mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan.

<sup>39</sup>Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis dalam Praktek Bisnis Rasulullah", *Jurnal Walisongo*, Volume 19, Nomor 1, 2011, hlm.145-150.

- b) Penggalangan ukhuwah Islamiah lembaga umat dan kemasyarakatan pada umumnya dalam rangka mengembangkan komunitas dan kelembagaan Islam.
- c) Manjalin dan mewujudkan berbagai MOU (Memorandum of Understanding) dengan berbagai kekuatan masyarakat.
- d) Riset potensi lokal dakwah, pengembangan potensi lokal dan pengembangan kelompok swadaya masyarakat.
- e) Katalisasi dan dampingan teknis kelembagaan.
- f) Konsultasi dan dampingan teknis kelembagaan.
- g) Mendampingi penyusunan rencana dalam rangka pengembangan komunitas dan institusi Islam.
- h) Memandu pemecahan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan umat.
- i) Melaksanakan stabilitas kelembagaan dan menyiapkan masyarakat untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa azas, pondasi dan prinsip sebagai pilar ekonomi Islam. Prinsip merupakan pokok dasar seseorang untuk berfikir atau bertindak berdasarkan azas tertentu. Kaitan antara azas dengan ekonomi Islam adalah cara berfikir dan bertindak secara ekonomi dengan menggunakan nilai-nilai Islam, antarlain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 8. Prinsip Pembangunan dalam Islam

Menurut Ifdlolul Maghfur terdapat tujuh Prinsip Pembangunan dalam Islam, diantaranya:<sup>40</sup>

### a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah prinsip yang fundamental dalam ajaran agama Islam. Tauhid merupakan panduan bagi setiap orang Islam dalam melangkah sehingga aktivitas duniawi tidak hanya berorientasi untuk mencari materi saja, namun juga memiliki nilai tambah berupa kemenangan dan kebahagiaan (falah) diakhirat. Tauhid sebagai prinsip pertama dalam ekonomi Islam, prinsip tauhid harus dimiliki oleh manusia karena didalamnya terdapat aturan serta hukum dalam perekonomian dan pemberdayaan.

### b. Prinsip Nubuawah

Prinsip nubuwah merupakan prinsip ekonomi kenabian, maksudnya adalah prinsip dalam ekonomi Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Prinsip nubuwah mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul/Nabi adalah untuk menjelaskan syariat Allah kepada umat manusia dan merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir yang di amanahkan untuk memberi teladan dan membimbing umat Islam sesuai dengan ajaran Allah..<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Ifdlolul Maghfur, "Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid", Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 5

<sup>41</sup>Evi Retnowulan dan Regina Hernani, "Tinjauan Hukum Jual Beli Secara *Online*", *Jurnal: Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19, 2010*, hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Prinsip nubuwah mengajarkan kepada umat Islam untuk senantiasa meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat yang diturunkan Allah kepada Nabi yaitu sifat Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah.

Sifat shiddiq berarti jujur dan benar. Rasulullah adalah seorang pedagang yang menanamkan prinsip kejujuran dalam setiap transaksi bisnis maupun kerjasama dengan pihak lain, oleh karena itu beliau mendapatkan gelar al-Amin. Sebagai pelaku ekonomi prinsip kejujuran ini haruslah dijadikan landasan agar tercipta transaksi bisnis yang fair dan sehat.

Sifat amanah berarti dapat dipercaya. Rasulullah adalah orang yang profesional dan memiliki kredibilitas serta tanggung jawab, karena sifat amanah menduduki posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi haruslah memiliki sifat ini sebagai karakter ekonomi Islam.

Sifat tabligh berarti komunikatif dan transparan. Para pelaku ekonomi Islam harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan juga harus transparan dalam mengelola kegiatan ekonomi, agar tidak ada pihak yang akan merasa di rugikan.

Sifat Fathonah berarti cerdas. Rasulullah adalah seorang yang cerdas dan memiliki intelektual tinggi, sehingga mampu menyeimbangkan antara urusan agama, ekonomi dan juga kenegaraan. Kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan dengan ilmu, skills, jujur,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

benar, kredibel dan bertanggung jawab dalam berekonomi dan berbisnis. Seorang pelaku ekonomi harus memiliki kecerdasan dan wawasan agar mampu mengelola kegiatan ekonomi secara efektif dan efisien.

c. Prinsip Kepemilikan

Prinsip dasar kepemilikan menurut ekonomi Islam:

- 1) Pemilik bukanlah penguasa mutlak atas sumber daya alam yang tersedia, tetapi pemilik dituntut untuk memanfaatkan sumber daya alam baik untuk dirinya maupun orang lain. Karena apa yang ada di bumi dan dilangit adalah kepemilikan Allah.
- 2) Batas kepemilikan manusia hanya pada saat manusia itu hidup di dunia.
- 3) Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum dan menjadi hajat orang banyak tidak boleh dimiliki secara individu.<sup>42</sup>

d. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan yang terwujud dalam ekonomi Islam yaitu keseimbangan antara kegiatan duniawi dan kegiatan ukhrawi. Wujud keseimbangan juga terdapat dalam keseimbangan hak individu dan kolektif. Hak individu adalah hak yang boleh dimiliki secara sendiri, sedangkan hak kolektif adalah hak yang harus dimiliki atau diambil manfaatnya oleh banyak orang.

<sup>42</sup>Meta “Fiqih Muamalah”, <https://itha911.wordpress.com/kumpulan-makalah-2/fiqih-muamalah-bank-syariah-dan-produk-bank-syariah/>, diakses pada 16 Maret 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Konsep keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi Islam, karena Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Keseimbangan dalam transaksi ekonomi terletak pada hak yang akan diberikan atau diperoleh oleh pelaku ekonomi tersebut, seimbang antara pemberian hak (upah) dengan yang telah dilakukan (kerjakan).

e. Prinsip Keadilan

Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran islam terutama dalam kehidupan hukum sosial politik dan ekonomi. Keadilan harus diterapkan dalam prinsip ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

Prinsip keadilan menuntut manusia untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Keadilan adalah kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterimanya, sehingga masing-masing mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami rintangan atau paksaan.

Wujud keadilan dalam ekonomi terkait dengan tiga hal, yaitu: keadilan tukar-menukar, keadilan distributif, keadilan sosial dan hukum.

---

<sup>43</sup>Adinda Mayang Puspita Dewi, “Pelaksanaan Jual Beli Pada Transaksi Produk Murabahah (Studi di Bank Muamalat Mataram)”, *Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2013, hlm. 4.

a. Keadilan tukar-menukar

Keadilan dalam tukar menukar adalah suatu kebijakan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan kepada sesamanya, sesuatu yang menjadi hak pihak lain atau sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain.

b. Keadilan distributif

Keadilan distributif merupakan suatu kebijakan yang terdapat di masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan serta pembagian barang maupun jasa secara merata.

c. Keadilan sosial dan hukum

Keadilan sosial merupakan perilaku manusia dalam berhubungan dengan masyarakat dan melaksanakan segala sesuatu yang menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan. Keadilan hukum merupakan perilaku manusia dalam mengatur hubungan yang seimbang dalam masyarakat sesuai dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku.

f. Prinsip Maslahah dan Manfaat

Prinsip maslahah yaitu dengan melakukan segala aktivitas untuk hal-hal yang mengacu pada kepentingan bersama. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk kemaslahatan bersama adalah melakukan hal yang bermanfaat serta terhindar dari hal yang membawa kerusakan (mafsadah) bagi manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kemaslahatan merupakan hal penting dalam kehidupan, dimana kemaslahatan individu dan kemaslahatan bersama harus saling mendukung. Untuk mengatur dan menjaga kemaslahatan bersama diperlukan sebuah instansi atau lembaga, dimana lembaga ini mempunyai wewenang dalam mengatur kemaslahatan individu dan kemaslahatan bersama.

g. Prinsip Persaudaraan (*ukuwah*) dan Tolong-menolong (*ta'awun*)

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong kepada sesama termasuk dalam kegiatan pemberdayaan. Dalam prinsip persaudaraan (*ukuwah*) merupakan identitas sebagai sesama muslim adalah saudara. Sedangkan, dalam prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) merupakan wujud kepedulian terhadap sesama muslim dalam meringkankan bebannya, sehingga dapat terwujudnya kegiatan yang bermanfaat untuk semua pihak.

Penulis akan menggunakan teori ini untuk menemukan bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pembangunan infrastruktur desa terhadap perekonomian masyarakat Desa Bram Itam Kanan, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## 9. Pemberdayaan Masyarakat

### a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuasaan atau kemampuan. Berasal dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses

menuju budaya, atau proses untuk memproleh daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pemberdayaan sebenarnya merupakan suatu istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan”. *Empowerment*, dalam khasanah barat lebih bernuansa “pemberi kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang tepat adalah “energize” atau katakan “memberi energi”. Pemberdayaan adalah pemberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.<sup>44</sup>

Menurut Wahjudin Sumpeno, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditunjukkan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi, pemberdayaan adalah upaya yang ditunjukkan agar suatu tatanan

---

<sup>44</sup> Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 78

dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.<sup>45</sup>

Pemberdayaan memiliki makna penyelenggaraan pemerintah desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.<sup>46</sup>

Desa yang otonom memberi ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara pendekatan yang mampu mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan.

#### **b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam**

Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas sosial, tanpa implikasi sosial ritus Islam akan dilakukan secara sia-sia.<sup>47</sup> Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang

<sup>45</sup> *Op., Cit*, Nurman, hlm. 246

<sup>46</sup> *Ibid*, Nurman, hlm. 246

<sup>47</sup> Titis Istikomah, “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui *Entrepreneurship Capacity Buliding*, (ECB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Study Pada Kelompok Tani Kecamatan Talang Padang), skripsi Program Strata 1 IAIN Lampung, 2015), hlm. 45.

menyangku tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Pengertian pemberdayaan masyarakat Islam adalah suatu proses atau tindakan yang terjadi di Indonesia dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi. Dengan demikian masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras untuk bekerja, berinteraksi, dan berwirausaha.<sup>48</sup>

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan gerakan perubahan. Dengan hal ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-Qur'an Q.S.

Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُمْ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia".<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Ibid, Titis Istikomah, hlm. 49.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahannya Q.S. Ar-Ra'd ayat 11, PT. Syamil Cipta Media, Bandung, 2005, hlm. 370



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan ayat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Dalam surat Al-Anfal: 53 juga dijelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat/pembangunan melalui pendekatan

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ  
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya: “(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>50</sup>

Sebagai sebuah ajaran yang bersifat Rabbaniyah yang tidak akan lekang oleh zaman dan senantiasa menjadi solusi atas segala bentuk tantangan zaman, Islam menawarkan konsep pembangunan masyarakat yang bermula pada pembangunan karakter pribadi-

<sup>50</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahannya Q.S. Al-Anfal ayat 53, PT. Syamil Cipta Media, Bandung, 2005, hlm. 270

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pribadi manusia yang dalam teori pembangunan/pemberdayaan masyarakat dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada manusia. Sama hanya seperti penjelasan surat Al-Anfal ayat 53 bahwasanya perubahan yang terjadi pada diri manusia merupakan upaya yang ada dalam diri manusia tersebut untuk merubahnya sendiri. Manusia yang akan berubah dan berusaha akan dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya. Melalui pemberdayaan masyarakat ini membukakan jalan bagi hamba-Nya untuk dapat merubah keadaannya menjadi lebih baik lagi.

#### G. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah pertama yang membahas strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa. Sebagai bahan pendukung terdapat penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pada paragraf selanjutnya akan dijelaskan tentang hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai sumber dan pengumpulan data.

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Kesimpulan
1	MG Ana Budi Rahayu	Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa	Agenda kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perekonomian nasional sebenarnya sudah dilakukan, hanya masih terkesan tempelan dan setengah hati. Karena fokusnya banyak di tingkat mikro (desa dan sekitarnya), namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

			<p>ketika berhadapan dalam tataran makro menjadi mentah dan sulit untuk mengakses kebijakan yang ada.</p> <p>Pertama, aspek sumber daya manusia. Kedua, aspek kelembagaan masyarakat. Ketiga, aspek teknologi dan modal.</p>
2	Faisal Nur, Siti Bulqis dan Hamka Naping	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa (Study Kasus: Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba	Partisipasi masyarakat di Desa Bialo pada proses pembangunan infrastruktur desa yang dibagi dalam tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan berupa kehadiran dan ide atau pemikiran. Pada tahap pelaksanaan berupa sumbangan tenaga, material dan dana. Pada tahap pemeliharaan berupa hanya sumbangan tenaga.
3	Teraik Kogoya, Benu Olfie, dan Olly Ersy Laoh	Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya-Papua	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa terbagi dalam tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Bentuk partisipasi masyarakat yang terbesar adalah bentuk sumbangan tenaga yang mencapai 77%, kemudian diikuti sumbangan material

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

			18%, tanah dan tanam tumbuh 3%, serta terkecil terbentuk sumbangan dana yaitu sebesar 2%. Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pemeliharaan terdiri atas tenaga, uamg, dan tidak memberikan pasrtisipasi. Bentuk partisipasi terbesar yaitu tenaga dengan persentasi 46,29%.
4	Ahmad Sururi	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak	Pemberdayaan masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) dalam men ingkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan Wanasalam kabupaten Lebak sudah melaksanakan 10 dari 12 prinsip-prinsip pemberdayaan, yaitu analisis minat dan kebutuhan, analisis prinsip pengorganisasian masyarakat, analisis keragaman budaya lokal, analisis perubahan budaya, analisis belajar sambil bekerja, analisis penggunaan metode yang sesuai, analisis kepemimpinan, analisis spesialis terlatih, analisis segenap keluarga dan analisis kepuasan. Pemberdayaan masyarakat melalui Pembangunan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

			<p>Infrastruktur Perdesaan (PIIP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan Wanasalam kabupaten Lebak belum melaksanakan 2 dari 12 prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu, prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis kerja sama partisipasi dan prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis demokrasi dalam penerapan ilmu.</p>
--	--	--	---

Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan skripsi ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada salah satu variabel yang digunakan dalam membahas pokok permasalahan, yaitu variabel pembangunan desa. Sedangkan, perbedaan antara skripsi ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang tidak melibatkan masyarakat desa sehingga penulis mendokuskan pada strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program pemberdayaan masyarakat desa (Study pada Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Study pada Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat). Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya penelitian, yaitu bulan Maret-Oktober 2019. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur desa masih dirasakan belum maksimal oleh masyarakat Desa Bram Itam Kanan, dari mulai perencanaan dan pelaksanaannya.
2. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan berbagai keterangan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.

#### B. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Selain itu metodologi penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu cara kerja yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan aturan-aturan baku (sistem dan metode) dari masing-masing disiplin ilmu yang diberikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian bersifat kualitatif ini hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>51</sup> Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian dalam kanca yang sebenarnya.<sup>52</sup> Penelitian *field researfch* dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan strategi optimalisasi pembangunan desa melalui program pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang tidak melibatkan masyarakat di dalamnya.

Selain menggunakan *fielod research* penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan.<sup>53</sup> Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan membaca, menelaah, dan mencatat bahan dari berbagai literature yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2012), hlm. 9.

<sup>52</sup> Hadi Hatrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), hlm. 142

<sup>53</sup> *Ibid*, Hadi Hatrisno, hlm. 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menemukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya.<sup>54</sup> Dengan mengumpulkan data-data dari lapangan yang berupa wawancara dan catatan hasil penelitian di lapangan.

### C. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh sendiri oleh organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu dari masyarakat desa setempat di Desa Bram Itam Kanan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi mengenai strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program alokasi dana desa pada Desa Bram Itam Kanan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi-publikasi.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data

<sup>54</sup> Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: STIA-LAN, 1998), hlm. 60.

<sup>55</sup> Benyamin Lakitan dkk, *Metode Penelitian*, (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 1998), hlm. 77

<sup>56</sup> *Ibid*, Benyamin Lakitan dkk, hlm. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sekunder dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah.

#### D. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta atau sekelompok orang.<sup>57</sup> Unit analisis juga menjelaskan kapan waktu (tahun berapa, atau bulan apa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan waktu tersebut. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Study pada Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat). Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokumen dari Desa Bram Itam Kanan.

Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dengan pertimbangan informasi.<sup>58</sup> Penentuan unit sampel dianggap telah memadai apabila telah sampai pada taraf kelebihan artinya bahwa dengan menggunakan informan

<sup>57</sup>Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, (2012), hlm. 62.

<sup>58</sup>Martinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009), hlm. 79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru.<sup>59</sup> Informan adalah orang yang memberi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian (narasumber). Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti dan diperkirakan orang yang menjadi informan ini menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari objek penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kewenangan dan keilmuan yang terkait dengan penelitian ini, mereka diantaranya:

1. Kepala desa Desa Bram Itam Kanan (Satu Orang)
2. Bendahara Desa Bram Itam Kanan (Satu Orang)
3. BPD Desa Bram Itam Kanan (Satu Orang)
4. Masyarakat Desa Bram Itam Kanan (Tujuh Orang)

## E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>60</sup> Untuk mengamati kejadian kompleks dapat menggunakan alat bantu misalnya seperti kamera, video tape, dan audio tape recorder atau radio perekam.

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm.85.

<sup>60</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: PT. Asdi Mahasaty (cetakan kelima), 2006, hlm. 63

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada Desa Bram Itam Kanan, untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.<sup>61</sup>

Sedangkan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang valid, menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bram Itam Kanan dan para aparatur desa yang bertanggung jawab atas penanganan pembangunan desa.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>62</sup> Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang pembangunan infrastruktur

<sup>61</sup>*Ibid*, Joko Subagyo, hlm. 39

<sup>62</sup> Suhartini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) h. 229



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Desa Bram Itam Kanan dari aparaturnya yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti kepala desa dan kaur pembangunan.

## F. Teknik Analisis Data

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola pada temanya dan membuang yang tidak penting. Dalam penelitian pasti banyak data yang ditemui di lapangan. Untuk itu perlu direduksi data yang sudah diperoleh bertujuan untuk memilih, merangkum serta memfokuskan terhadap data penting yang kita inginkan.

### 2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, selanjutnya adalah menyajikan data. Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian data adalah pendeskripsian seluruh informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>63</sup> Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Jadi dengan penyajian data ini maka akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan sejauh mana data yang diperoleh, sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya untuk melakukan tindakan lainnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

<sup>63</sup> Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 85



Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel. Dalam proses analisis data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan merupakan suatu yang berkaitan erat. Artinya ketiga alur tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data atau penarikan kesimpulan.

#### G. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memudahkan penulis dalam penyusunan dan pemahaman tentang skripsi, agar nantinya peneliti ini dapat berjalan sesuai dengan setting yang telah penulis tentukan sebelumnya. Maka dari itu terlebih dahulu disusun dalam sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan masalah, kerangka teori dan tinjauan pustaka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**BAB II** : Metode penelitian, pada bab ini berisi mengenai jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data, dan jadwal penelitian.

**BAB III** : Gambaran umum lokasi penelitian, bab ini berisi mengenai sejarah singkat berdirinya Desa Bram Itam Kanan, kondisi geografi Desa Bram Itam Kanan, tata pemerintahan Desa Bram Itam Kanan, kondisin demografi Desa Bram Itam Kanan.

**BAB IV** : Analisis dan pembahasan, bab ini berisi mengenai strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program pemberdayaan masyarakat Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**BAB V** : Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Beram Itam Kanan

Desa Beram Itam Kanan adalah Desa yang berawal dari nama yang hanya satu kata yaitu Bram Itam, Namun karena letak Wilayah Bram Itam berada pada posisi yang sebelah kanan Maka dinamakan Beram Itam Kanan dan Desa Sungai Saren diberi nama Bram Itam Kiri. Menurut sejarah para tokoh- tokoh yang masih Hidup yang sekarang masih menetap di Desa Beram Itam Kanan. Bahwa Desa Beram Itam Kanan ini lahir dan dibangun oleh orang-orang yang kelahirannya dari Jawa. Dan Mereka merantau ke Sumatera ini dan mereka juga membenahi Desa ini yang tadinya semak masih Hutan dan Semak Belukar, dengan keuletan dan Keteguhan Hati disertai Penuh Kesabaran para Perantau tersebut maka menjadilah Desa yang mulai terbenahi yaitu pada sekitar Tahun 1950 M. Yang Ibukota Desa tersebut terletak di daerah Pasar Rabu yang pada saat itu Belanda masih menetap di daerah tersebut.<sup>64</sup>

Dengan mulai tertata Desa tersebut maka diangkatlah seorang Pemimpin Desa yang disebut “MANGKU” yaitu Mangku Uban, selama kepemimpinan Beliau maka Desa Beram Itam Kanan ini Mulai Meluas ke beberapa Wilayah. Selanjutnya Kepala Desa yang ke 2 dipimpin Oleh Kepala Desa yang bernama Kaslan dan seterusnya Dipimpin Oleh Datuk Hirun

---

<sup>64</sup> Dokumentasi profil Desa Beram Itam Kanan, di kantor desa Desa Beram Itam Kanan, pada 29 September 2019

kemudianan Jabatan Kepala Desa Bram Itam Kanan dijabat oleh Kaspul Anwar. Setelah masa Jabatannya Habis digantikan oleh Kepala Desa yang bernama Hasan Basri.

Setelah Masa Jabatan Hasan Barsi berakhir, Maka diadakan Pemilihan Kepala Desa Baru Di Desa Beram Itam Kanan. Dan Pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak Murtado. Selama masa kepemimpinan Bapak Murtado Desa Beram Itam Kanan mengalami Perubahan yaitu Pemekaran Desa. Yang semula Desa Beram Itam Kanan terdiri dari 8 Dusun dan 34 RT. Sekarang menjadi 2 Dusun dan 17 RT. Setelah habis masa Jabatan Bapak Murtado, Desa Beram Itam Kanan di Jabat Oleh Pjs.Kepala Desa Bapak H. Zainuddin,S.Sos dan setelah dilakukan pemilihan Kepala Desa Pada tahun 2016 di menangkan oleh Bapak Saiful Rohman,S.Hum dan sampai Sekarang Desa Beram Itam Kanan di Jabat Oleh Bapak Saiful Rohman, S.Hum.

## B. Letak Geografis

Secara geografis Desa Beram Itam Kanan teletak di bagian Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas wilayah  $\pm 1.500,74$  Ha/105,74 KM<sup>2</sup> dan dengan batas wilayah sebagai berikut : <sup>65</sup>

- Sebelah Timur dengan : Desa Pantai Gading
- Sebelah Utara dengan : Desa Mekar Tanjung
- Sebelah Selatan dengan : Desa Purwodadi
- Sebelah Barat dengan : Desa Jati Emas

<sup>65</sup> Dokumentasi profil Desa Beram Itam Kanan, di kantor desa Desa Beram Itam Kanan, pada 29 September 2019

Luas Wilayah Desa Beram Itam adalah 1500,74 Ha/  $\pm$  105,74 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari :

1. Tanah Sawah :  $\pm$  200 Ha.
2. Tanah Pekarangan :  $\pm$  18,05 Ha.
3. Tanah Perkebunan :  $\pm$  9,404 Ha.

Keadaan Topografi Desa Beram Itam Kanan dilihat secara umum keadaan merupakan daerah yang di aliri oleh sungai Bram Itam. Yang beriklim sebagaimana desa-desa lain di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai Iklim Kemarau, panca robah dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman pertanian yang ada di Desa Beram Itam Kanan.<sup>66</sup>

#### a. Orbitas/Jarak Antar Ibu Kota<sup>67</sup>

Jarak(KM)	Desa B.I.Kanan	Ibu Kota Kec.	Ibu Kota Kab.	Ibu Kota Prov.
Desa B.I.Kanan	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>135</b>
Ibu Kota Kec.	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>130</b>
Ibu Kota Kab.	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>152</b>
Ibu Kota Prov.	<b>135</b>	<b>130</b>	<b>152</b>	<b>0</b>

<sup>66</sup> Dokumentasi profil Desa Beram Itam Kanan, di kantor desa Desa Beram Itam Kanan, pada 29 September 2019

<sup>67</sup> Dokumentasi profil Desa Beram Itam Kanan, di kantor desa Desa Beram Itam Kanan, pada 29 September 2019

**b. Prasarana Umum Yang Ada**<sup>68</sup>

Jenis Prasarana	Volume	Kondisi
Jalan Provinsi	4.000 Meter	Baik
Jalan Desa	12.000 Meter	Rusak
Jalan Lingkungan/Rabat Beton	7000 Meter	Sedang
Jalan Produksi/Tanah	14.000 Meter	Rusak
Gedung SD	1 Unit	Baik
Gedung Madrasah	2 Unit	Sedang
Poskesdes	1 Unit	Baik
Posyandu	2 Unit	Baik
Sumur Bor	20 Unit	Baik
Balai Desa/Kantor Desa	1 Unit	Baik
Masjid	2 Unit	Baik
Musholla/Surau	5 Unit	Sedang

**c. Aset Desa/Kekayaan Desa**<sup>69</sup>

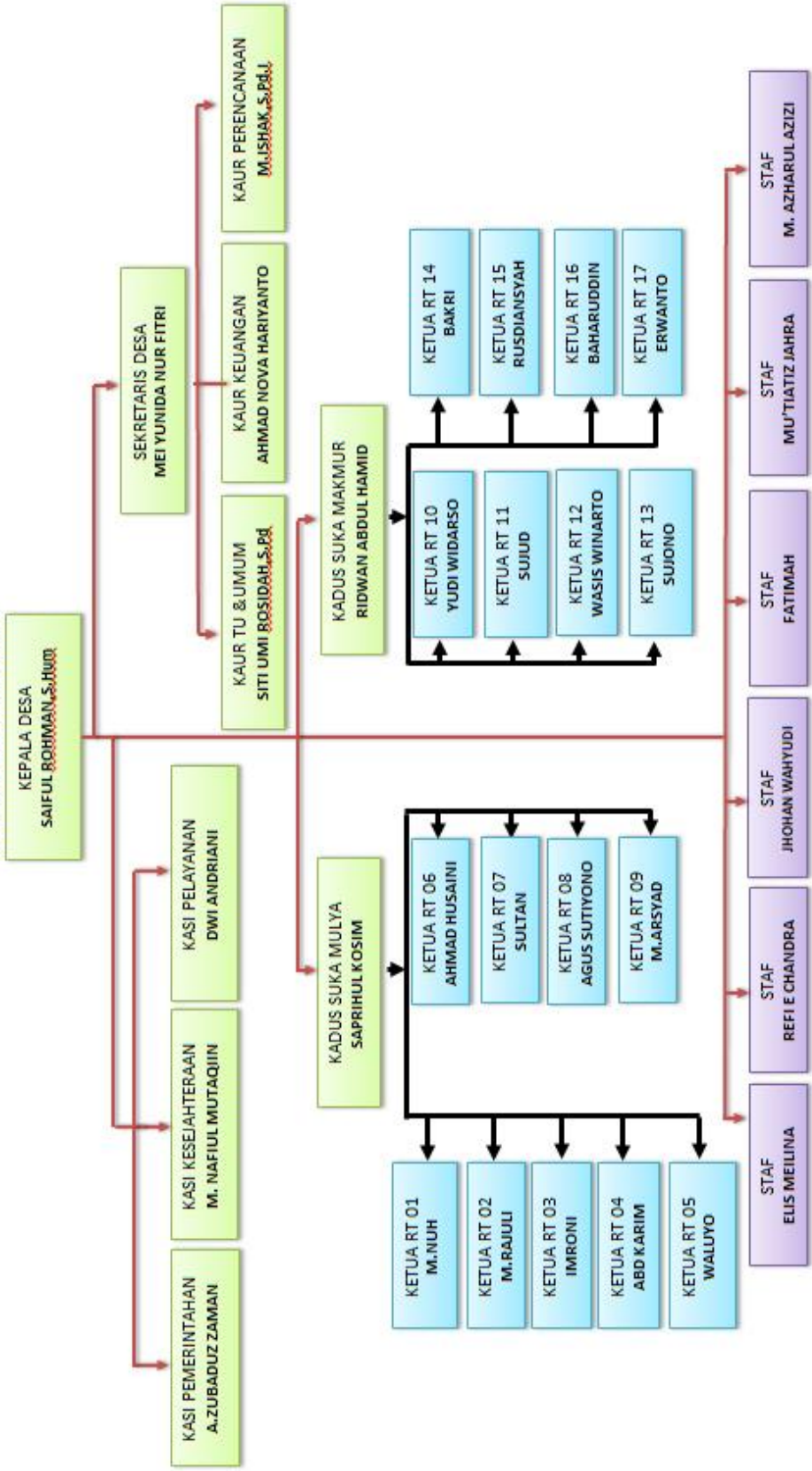
Jenis Aset	Volume	Kondisi
Tanah TKD Kelapa	2,0 Hektar	Tidak Produktif
Tanah Perkarangan Masjid	0.02 Hektar	Tidak Digunakan
Tanah Lokasi Perkantoran	0,01 Hektar	Dimanfaatkan
Tanah Lokasi TPU	2,0 Hektar	Dimanfaatkan
Tanah Lapangan Bola Kaki	0,5 Hekter	Dimanfaatkan

<sup>68</sup> Dokumentasi profil Desa Beram Itam Kanan, di kantor desa Desa Beram Itam Kanan, pada 29 September 2019

<sup>69</sup> Dokumentasi profil Desa Beram Itam Kanan, di kantor desa Desa Beram Itam Kanan, pada 29 September 2019



STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DESA BERAM ITAM KANAN  
KECAMATAN BRAM ITAM  
State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## D. Sarana dan Prasarana

### 1. Demografi

#### a. Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Beram Itam Kanan adalah 2.186 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 618 KK. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Beram Itam Kanan. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.<sup>70</sup>

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1.195 Jiwa	991 Jiwa	2.186 Jiwa

#### b. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Beram Itam Kanan cenderung Menurun karena tingkat penduduk yang Pindah lebih besar dari penduduk yang datang.

Tabel : Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

<sup>70</sup> Dokumentasi profil Desa Beram Itam Kanan, di kantor desa Desa Beram Itam Kanan, pada 29 September 2019

### Desa Beram Itam Kanan Tahun 2018-2019<sup>71</sup>

No	Rukun Tetangga	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		2018	2019
1	RT 01	166	145
2	RT 02	148	193
3	RT 03	184	158
4	RT 04	132	157
5	RT 05	162	183
6	RT 06	188	224
7	RT 07	133	84
8	RT 08	113	132
9	RT 09	48	12
10	RT 10	189	117
11	RT 11	133	112
12	RT 12	110	148
13	RT 13	77	108
14	RT 14	120	159
15	RT 15	90	120
16	RT 16	101	63
17	RT 17	80	71
<b>Jumlah</b>		<b>2.174</b>	<b>2.186</b>

#### c. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan struktur umur, penduduk Desa Beram Itam Kanan tergolong penduduk usia muda. Indikasi ini tergambar dari

<sup>71</sup> Dokumentasi profil Desa Beram Itam Kanan, di kantor desa Desa Beram Itam Kanan, pada 29 September 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

rasio penduduk usia kelompok umur 18-60 tahun merupakan yang terbanyak jumlahnya masing-masing Laki – laki 791 jiwa dan Perempuan 673 jiwa. Kemudian disusul kelompok umur 7-17 tahun yaitu masing-masing Laki – laki 250 jiwa dan Perempuan 201 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Desa Beram Itam Kanan menunjukkan bahwa penduduk Laki – laki relatif lebih banyak dibandingkan Perempuan.

Tabel Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada setiap RT di Desa Beram Itam Kanan tahun 2019<sup>72</sup>

No	Kelompok Umur	Tahun 2019		
		LK	PR	Jumlah
1	0 – 6	154	117	271
2	7 – 17	250	201	451
3	18 – 45	528	459	987
4	46 – 60	192	137	329
5	60 Keatas	71	77	148
<b>Jumlah</b>		<b>1.195</b>	<b>991</b>	<b>2.186</b>

#### d. Keadaan Sosial

##### 1) Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup

<sup>72</sup> Dokumentasi profil Desa Beram Itam Kanan, di kantor desa Desa Beram Itam Kanan, pada 29 September 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Beram Itam Kanan cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.<sup>73</sup>

## 2) Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Desa Beram Itam Kanan Memiliki Sarana Pendidikan 1(satu) Sekolah Dasar, 2(Dua) Paud, 2 (Dua) Madrasah Ibtidaiyah, 1 (satu) SLTP/MTS,dan 1(Satu) SLTA/SMA.<sup>74</sup>

## 3) Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Beram Itam Kanan antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta

<sup>73</sup> Dokumentasi profil Desa Beram Itam Kanan, di kantor desa Desa Beram Itam Kanan, pada 29 September 2019

<sup>74</sup> Dokumentasi profil Desa Beram Itam Kanan, di kantor desa Desa Beram Itam Kanan, pada 29 September 2019

pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, dan angka status anak gizi buruk. Desa Beram Itam Kanan memiliki 1(satu) Poskesdes 2 (Dua) Posyandu Balita dan 2(Dua) Posyandu Lansia.

#### 4) Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Beram Itam Kanan 100% memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik.

#### 5) Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Wanita dan anak merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan Desa Beram Itam Kanan. Wanita dan anak dari komposisi penduduk Desa Beram Itam Kanan, pada tahun 2019 jumlah penduduk wanita mencapai 991 jiwa atau sekitar 47,59 % dari total penduduk berjumlah 2.186 jiwa, sedangkan jumlah penduduk 0-17 tahun mencapai 32,94 %.

Masih tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya kaum perempuan dan pemuda dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pembangunan, hal itu terlihat dari prestasi pemuda dalam bidang seni budaya dan olah raga masih sangat rendah.<sup>75</sup>

#### a. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat desa Beram Itam Kanan menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, khitanan, panen raya serta prosesi cuci kampung jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah Lembaga Adat desa Beram Itam Kanan (LAD), lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

#### b. Politik

Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Lebih lanjut format politik ini terumuskan juga berdasarkan UU Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta

<sup>75</sup> Dokumentasi profil Desa Beram Itam Kanan, di kantor desa Desa Beram Itam Kanan, pada 29 September 2019

UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan demokrasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum,

- 6) Keadaan Ekonomi
  - a) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Beram Itam Kanan secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.<sup>76</sup>

Yang menarik perhatian penduduk Desa Beram Itam Kanan masih banyak yang tidak memiliki usaha atau mata pencaharian tetap, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Beram Itam Kanan belum terbebas dari kemiskinan.

---

<sup>76</sup> Dokumentasi profil Desa Beram Itam Kanan, di kantor desa Desa Beram Itam Kanan, pada 29 September 2019

Berikut ini tabel mata pencarian penduduk Desa Beram Itam Kanan dari tahun 2019<sup>77</sup>

No	Mata Pencapaian	Jumlah (Orang)	Persentase dari jumlah penduduk
1	Petani	613	25,53 %
2	Buruh Tani	30	1,5 %
3	Pembudidaya	4	0,19 %
4	Seniman	1	0,04 %
5	Karyawan Swasta	17	0,83 %
6	PNS/TNI/POLRI	14	0,69 %
7	Ibu Rumah Tangga	650	27,65 %
8	Pembantu Rumah Tangga	2	0,09 %
9	IKM	8	0,39 %
10	Pedagang Keliling	15	0,74 %
11	Pengrajin Industri Rumah Tangga	2	0,09 %
12	Bengkel	3	0,17 %
13	belum bekerja	722	30,58 %
14	Tidak bekerja	105	4,44 %
<b>Jumlah</b>		<b>2.186</b>	<b>100 %</b>

#### 7) Kondisi Pemerintahan Desa

Desa Beram Itam Kanan terdiri dari II Dusun dan 17 RT

dengan perincian sebagai berikut :

- a) Dusun Suka Mulya, terdiri dari 9 RT yaitu RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, RT 07, RT 08, dan RT 09.
- b) Dusun Suka Makmur, terdiri dari 8 RT yaitu RT 10, RT 11, RT 12, RT 13, RT 14, RT 15, RT 16, dan RT 17.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Dokumentasi profil Desa Beram Itam Kanan, di kantor desa Desa Beram Itam Kanan, pada 29 September 2019

<sup>78</sup> Dokumentasi profil Desa Beram Itam Kanan, di kantor desa Desa Beram Itam Kanan, pada 29 September 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### **A. Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur desa Melalui Program Alokasi Dana Desa Pada Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Berdasarkan penelitian *di lapangan* secara umum penerapan prinsip *Good Governance* di desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan harus ditingkatkan kembali kinerja pemerintah desa. Ini didasari karena adanya beberapa indikator yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Desa Bram Itam Kanan masih memiliki kendala dan hambatan dalam pembangunan desa, selain itu pula belum sepenuhnya efektif dan efisien dalam penyusunan APBDes sehingga pembangunan fisik yang bermasalah dapat dilihat pada pembangunan jalan umum, pembangunan jalan desa, pembangunan parit atau tanggul sehingga saat musim penghujan kendaraan roda dua, empat maupun roda enam tidak bisa berjalan dengan baik, selain itu pula minimnya penerangan lampu jalan secara menyeluruh sehingga mengakibatkan sering terjadinya pencurian, dan kecelakaan.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi dan nepotisme.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis menemukan data terkait optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program alokasi dana desa pada Desa Bram Itam Kanan, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di antaranya: partisipasi, transparansi, responsibilitas, independensi dan kesetaraan dan kewajaran, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

### 1. Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi, mengawasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi adalah salah satu prinsip dari *good governance*, agar UU Nomor 6 tahun 2014 dapat diterapkan dan berjalan, maka di Desa Bram Itam Kanan ini, partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam penilaian kinerja dari perangkat Desa Bram Itam Kanan tersebut. Hal ini diperuntukkan untuk merangkul masyarakat dalam memenuhi kepentingan masyarakat setempat seperti infrastruktur jalan, pendidikan dan mushola. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

Dalam penyelenggaraan pemerintah berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 kami berupaya mengajak partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa, seperti; jalan yang menjadi pusat mata pencarian masyarakat. Demi harapan agar ada kerjasama antara masyarakat dan pegawai pemerintahan dalam membangun desa ini lebih baik lagi.<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, 27 September 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, bentuk partisipasi masyarakat di Desa Bram Itam Kanan terus diupayakan oleh pemerintah desa, dengan merangkul masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan. Karena jalan merupakan akses penting di daerah tersebut, sehingga pemerintah desa mengajak partisipasi masyarakat. Meskipun masih ditemui hanya beberapa pekerja yang ikut serta dalam pembangunan desa, karena masih terdapat unsur kekeluargaan. M. Tohir selaku Kaur pembangunan pemerintahan menambahkan, dengan adanya partisipasi masyarakat sangat membantu pembangunan desa. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut:

Kami terus berupaya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, agar pemerintahan berjalan dengan baik. Terlepas dari peran serta masyarakat kami juga merangkul LSM dan Mahasiswa untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik, karena dengan adanya mereka dapat memberikan masukan yang positif untuk kemajuan pemerintahan ini.<sup>80</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, bentuk partisipasi masyarakat dalam kinerja perangkat Desa Bram Itam Kanan adalah ikut mengawasi kegiatan dan kinerja yang dilakukan pegawai, biasanya dalam proses pembangunan jalan, gedung, pemukiman, mushola, sarana pendidikan, pengairan, dan bentuk pembangunan lainnya yang dilaksanakan di daerah sekitar Desa Bram Itam Kanan ini. Selain itu masyarakat pun bisa melakukan pengaduan langsung Kepala Desa Bram Itam Kanan, apabila ada pembangunan yang dilakukan oleh perangkat Desa Bram Itam Kanan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau pembangunan yang dulu telah rusak bisa masyarakat adukan ke Kantor Desa Bram Itam Kanan untuk bisa diperbaiki, karena tanpa adanya

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ishak selaku Kaur perencanaan, 04 September 2019.



bantuan dan partisipasi langsung dari masyarakat, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Siti Umi Rosidah, selaku Kaur TU & Umum di Kantor Desa Bram Itam Kanan , sebagai berikut:

Biasanya bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan di Desa Bram Itam Kanan berupa pengaduan tentang infrastruktur jalan yang rusak dan harus diperbaiki dan juga beberapa di antara mereka ikut andil dalam membangun infrastruktur tersebut saat sedang dibangun atau diperbaiki kembali. Selain masyarakat ada juga yang ikut berpartisipasi adalah wartawan, LSM, mahasiswa dan masyarakat umum lainnya. Selain itu kami di sini sudah tentu melibatkan stakeholder dalam semua aktivitas perencanaan pembangunan.<sup>81</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, keterlibatan masyarakat terhadap proses pembangunan yang dilakukan perangkat Desa Bram Itam Kanan dalam hal ini hanya sebatas pengaduan dan sebagian yang terlibat dalam pembangunan, dengan kata lain masyarakat terlibat ketika proses pembangunan tersebut sudah berjalan bahkan sudah rampung, namun pada tahap proses pengawasan berjalannya pembangunan, masyarakat tidak banyak yang turut ikut berpartisipasi sehingga bentuk pengaduan yang dilakukan masyarakat bisa dikategorikan terlambat. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Jali selaku Masyarakat di Desa Bram Itam Kanan sebagai berikut:

Hanya sebagian saja itu yang ikut serta bekerja, sedangkan banyak masyarakat di sini membutuhkan pekerjaan, kenapa tidak masyarakat di sini semua saja, malah nyewa tukang dari luar. Kadang juga jalan yang diperbaiki cuma jalan yang menuju kantor-kantor desa saja tidak semuanya diperbaiki.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Umi Rosidah selaku Kaur TU & Umum Desa Bram Itam Kanan, 04 September 2019.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Jali selaku Masyarakat di Desa Bram Itam Kanan, 26 September 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, sebagian besar bentuk pembangunan yang dilakukan oleh perangkat desa tidak sesuai harapan masyarakat dikarenakan yang terlibat dari mulai proses perencanaan hingga rampungnya suatu pembangunan, masyarakat tidak diikutsertakan. Seharusnya tahap partisipasi di sini melibatkan masyarakat pada proses pembangunan sudah dilakukan dari tahap perencanaan hingga selesainya proses pembangunan.

## 2. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi dapat berupa keterbukaan informasi dan komunikasi. Bentuk transparansi yang dilakukan oleh perangkat Desa Bram Itam Kanan ini dalam kinerja dan kegiatan dilakukan biasanya dalam proses pembangunan, salah satunya dengan sering mengundang masyarakat setelah proses pengadaan barang jasa berjalan, ada juga tokoh masyarakat, BPD setempat dan perangkat desa itu sendiri yang nantinya akan memberikan informasi langsung tentang proses pembangunan yang akan dilakukan untuk mendukung kegiatan masyarakat melalui rapat bersama. seperti yang disampaikan oleh anggota BPD setempat. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

Kami berupaya terus mengundang berbagai elemen masyarakat ketika akan melakukan pembangunan di desa, seperti halnya pembangunan jembatan, paret jalan dan perairan untuk irigasi sawah. Ini tujuannya untuk

mendapatkan masukan dan informasi dalam pembangunan yang baik, selain itu pula nantinya mendapatkan pencerahan yang baru.<sup>83</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, bentuk transparansi yang dilakukan oleh perangkat Desa Bram Itam Kanan memang cukup baik, namun ada beberapa hal yang nampaknya harus diperhatikan guna tercapainya bentuk transparansi yang akuntabel dan menyeluruh, maksud dari akuntabel di sini adalah seluruh aktivitas yang dipublikasikan kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan, di mana dalam perjalanan penerapan transparansi akan ada beberapa kendala yang muncul dari perbedaan pemahaman dan cara pandang masyarakat terhadap satu proses pembangunan yang akan dilaksanakan. M. Tohir, selaku Kaur Pembangunan menambahkan, seharusnya ada keterbukaan tentang anggaran dana yang dijadikan pembangunan, agar masyarakat tidak berprasangka yang tidak-tidak. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut:

Kami berupaya semampu kami untuk mencoba menjelaskan kepada masyarakat, tapi semua itu ada wewenangnya pada kepala desa. Seharusnya ada keterbukaan dalam segala anggaran dan habis digunakan untuk pembangunan apa saja, namun yang terjadi masih saja ada ketertutupan secara menyeluruh. Kalau kami yang hanya perangkat desa ya bisa apa, hanya bisa memberikan masukan semampu kami saja dan keputusannya ada pada kepala desa. Namun untuk pembangunan kami terus berupaya mengupayakan keterbukaan kepada semua perangkat dan masyarakat yang ada, dengan rapat dalam three wulan dan memberikan informasinya pada website desas Desa Bram Itam Kanan.<sup>84</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, pada dasarnya selain transparansi dengan cara mengundang masyarakat pada saat musyawarah, perangkat Desa Bram Itam Kanan juga berusaha mempublikasikannya dalam bentuk web atau jaringan internet. Tetapi kendala yang dihadapi adalah tidak

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, 27 September 2019.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ishak selaku Kaur perencanaan, 04 September 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

semua masyarakat Desa Bram Itam Kanan mengenal atau menguasai internet, sehingga transparansi selama ini hanya dilakukan dengan mengundang elemen masyarakat dalam rapat atau musyawarah bersama.

### 3. Responsibilitas

Semua pemerintah Desa Bram Itam Kanan mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggungjawabnya masing-masing, baik itu terhadap masyarakat dan lingkungan, yang diperuntukkan dapat terpelihara kesinambungan dan kenyamanan dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan yang baik. sebagaimana dapat dilihat dari wawancara bersama Bapak A. Zubaduz Zaman dan M. Ishak, sebagai berikut:

Kita terus tingkatkan kepatuhan dan kewajiban dalam melakukan tugas masing-masing pegawai di sini. Dengan menerapkan sistem reward dan punishment. Dan mereka juga harus melaporkan perkembangan kinerja mereka masing-masing.<sup>85</sup> Selaku pegawai kami tidak bisa sesuka kami dalam berkerja, semuanya sudah adang tanggungjawabnya masing-masing, dari mulai datang, bekerja dan pulang. Semuanya sidah diatur di peraturan desa.<sup>86</sup>

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, organ pemerintah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan desa dan melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di desa tersebut dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

<sup>85</sup>Wawancara dengan Bapak A.Zubaduz Zaman selaku Kepala Kasi pemerintahan Desa Bram Itam Kanan, 24 September 2019.

<sup>86</sup>Wawancara dengan Bapak M. Ishak selaku Kaur Perencanaan Desa Bram Itam Kanan, 24 September 2019.

#### 4. Independensi

Dalam pencapaian kemandirian yang dilakukan oleh Desa Bram Itam Kanan, terus mengupayakan kemandirian yang tidak terkait dengan instansi-instansi lain sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi. Pihak bank harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ pemerintah tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

Kami tetap berpacu pada ADRT (Anggaran Dasar Rumah Tangga) yang melindungi kami, kami tetap berpacu pada aturan-aturan di dalamnya. Kami juga menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan.<sup>87</sup>

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, setiap bagian bidang Desa Bram Itam Kanan harus melakukan kerjanya masing-masing dengan baik dan benar, tidak terpengaruh oleh bidang yang lain. Seyogyanya pekerjaan mereka telah terdapat aturan masing-masing, sehingga kecil kemungkinan untuk tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, jika mereka melakukan pelanggaran maka siap diberhentikan. Pegawai di Desa Bram Itam Kanan juga terus menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, hingga kecil terjadi untuk melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain, ini yang menyebabkan terwujudnya sistem pengendalian internal yang efektif.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, 27 September 2019.

## 5. Kesetaraan dan Kewajaran

Desa Bram Itam Kanan terus mengupayakan kemajuan desa tersebut, dengan bahu membahu dalam mengerjakan tugas, tanpa mengganggu pekerjaan yang lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, Desa Bram Itam Kanan senantiasa memperhatikan kepentingan bersama berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran yang dimiliki masing-masing pegawai Desa Bram Itam Kanan. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

Kami tetap bekerja sama dengan desa-desa yang lain, atau dari Kecamatan dalam memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Desa Bram Itam Kanan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.<sup>88</sup>

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, dengan menerima masukan dari Kecamatan pihak Desa Bram Itam Kanan dapat meningkatkan mutu kerja mereka dengan baik, karena dengan adanya saran yang membangun Desa Bram Itam Kanan ini tentu sangat terbantu dalam pencapaian misi untuk memajukan dan memberikan kebutuhan masyarakat luas. Menurut Bapak Maryono selaku BPD Desa Bram Itam Kanan telah bekerja sama dengan baik sesama pegawai, dan terus menerima masukan satu sama lain terkait kinerja mereka tanpa membedakan. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersamanya sebagai berikut:

Sepengetahuan saya, menejer kami tidak pernah membedakan pekerjaan atas golongan ataupun ras, kami bekerja sesuai dengan bidang kami masing-masing, karena dengan begitu kami dapat menjalankan pekerjaan

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, 27 September 2019.



kami dengan baik, kalau kami tidak sesuai bidangnya maka kami akan kewalahan dalam menjalankan pekerjaan kami. Untungnya kami di sini dieperlakukan dengan baik, semua yang bekerja di sini pun begitu, kami tetap menerima kritik dan saran atas kehilafan kami, dengan adanya kotak saran yang ditaruh diruang kerja kami masing-masing kami menjadi lebih terbuka dengan perasaan dan keinginan kami. Dan kami sangat nyaman kerja di sini.<sup>89</sup>

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, pihak Desa Bram Itam Kanan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada seluruh pegawai yang ada di sana, ini bertujuan agar manfaat pemerintah dapat dirasakan bersama dan dapat berkontribusi satu-sama lain. Dengan begitu dari jajaran yang paling tertinggi hingga terendah dapat bekerja dengan baik, manajer juga kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik, ini berdampak positif bagi masyarakat luas yang memiliki keahlian di bidangnya maka terbuka lebar untuk mendapatkan pekerjaan.

## 6. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pemerintah desa selalu ikut serta dalam pengaturan perekonomian di Desa Bram Itam Kanan yang mana keputusan lembaga ada mampu mempengaruhi masyarakat desa sekami, sehingga pemerintah Desa Bram Itam Kanan dan lembaga adat setempat bekerjasama dalam memberdayakan masyarakat dengan cara pengaturan ekonomi masyarakat dan juga membantu permodalan usaha.

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ibu Dwi Andriani selaku Kasi Pelayanan Desa Bram Itam Kanan, 21 September 2019.

### a. Memberikan Permodalan Usaha

Dalam memberikan permodalan kepada anggota, maka Kelompok Mandiri Sejahtera melakukan beberapa analisa dalam memberikan permintaan anggota, dengan melihat jumlah saldo yang ada dan juga mempertimbangkan kembali resiko yang kemungkinan terjadi, untuk itu dilakukan pengamatan terhadap anggota yang ingin melakukan pinjaman untuk permodalan usaha. Dalam hal ini pemberian permodalan hanya akan dibantu setengah setengah dari modal yang diperlukan, sehingga bila mana ada masyarakat atau anggota Kelompok Mandiri Sejahtera bisa bekerja sama dengan Kelompok Mandiri Sejahtera untuk memuali usaha dan keuntungan dibagi dua. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Siti Umi Rosidah, selaku Kaur TU & Umum di Kantor Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

Pinjaman dana akan diberikan sesuai kespakatan besarnya. Untuk besarnya pinjaman sebesar 500.000 yang harus diansur harus dibayarkan selama satu tahun. Rata-rata mereka yang ingin melakukan pinjaman diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk memulai usaha. Kalau ada yang ingin memulai usaha dan bagi hasil, maka kami sangat senang sekali, dalam pemberiannya kami harus memastikan baik-baik dana yang akan digunakan untuk memulai usaha, usaha harus jelas, terukur dan yang bersangkutan memang mampu untuk menjalankannya. Kami akan memberikan setengah dari modal yang dibutuhkan, ada salah satu anggota kita, kemarin memulai usaha toko obat-obatan, dengan sistem bagi hasil dan kami meminjamkannya 5 juta, dan keuntungan alhamdulillah ada setiap bulan 300 sampai 400 perbulannya.<sup>90</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, sebagian besar anggota melakukan pinjaman dalam memenuhi kebutuhan biaya anak sekolah sekolah, kebutuhan sehari-hari dan juga untuk modal usaha, namun dari

<sup>90</sup>Wawancara dengan Siti Umi Rosidah, selaku Kaur TU & Umum di Kantor Desa Bram Itam Kanan, 04 September 2019..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengamatan penulis sebagian besar mereka untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan modal usaha yang lebih dominan. Modal usaha yang dilakukan anggota yang paling banyak adalah melakukan usaha membuka toko bagi yang ingin bagi hasil dengan Kelompok Mandiri Sejahtera, ada juga yang memulai usaha untuk berdagang membuka warung dan menjual gorengan. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama dengan Bapak Santoso, selaku Masyarakat Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

Saya melakukan pinjaman untuk modal usaha, dagang dan ada juga yang meminjam dana untuk modal usaha ikan lele, dia tetangga saya dan juga anggota Kelompok Mandiri Sejahtera di sini, kalau untuk angsuran di sini semuanya harus membayar selama sebulan sekali dan kalau nggak maka yang bersangkutan akan mendapat sanksi tidak akan diberikan pinjaman kembali, tapi di sini itu adat masih dipegang teguh, jadi jarang kalau ada yang meminjam dana seperti dana bersama gitu, dan tidak mau mengangsurnya, jadi semua membayar sesuai dengan kewajibannya.<sup>91</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, jadi dalam bidang usaha yang dilakukan anggota untuk tambahan modal mereka lebih banyak menggunakan dana pinjaman yang telah mereka pinjam lebih banyak digunakan untuk usaha berdagang karena menurut mereka berdagang lebih mudah dari pada usaha yang lainnya. Dengan adanya cicilan perbulan di karenakan dapat meringkankan beban angsuran pengeluaran setiap bulannya. Sedangkan sebagian anggota menyatakan sangat keberatan dengan adanya angsuran yang dilakukan 1 minggu sekali, di karenakan uang wajib iuran telah dilakukan per minggu, untuk itu mereka setuju untuk pinjaman dicicil perbulan karena sebagian penghasilan masyarakat banyak yang tiap perbulan.

<sup>91</sup>Wawancara dengan dengan Bapak Santoso, selaku Masyarakat Desa Bram Itam Kanan, 04 September 2019..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dari pengamatan penulis dapat diketahui bahwa dalam pencairan dana pinjaman pada Kelompok Mandiri Sejahtera cukup cepat dalam melakukan pencairan dana. Pengajuan pencairan minimal 3 hari dan maksimal 1 minggu dana yang mereka ajukan akan cair. Dan untuk klasifikasi umur mereka antara 37-53 tahun. Selain itu pula untuk tingkat pendidikan anggota Kelompok Mandiri Sejahtera, Tidak Sekolah 32, SD 24 anggota, SMP 4 anggota, SMA 5 anggota dan S1 2 anggota. Pada Kelompok Mandiri Sejahtera Desa Bram Itam Kanan. dilihat dari perkembangan Kelompok Mandiri Sejahtera yang berdiri pada tanggal 31 desember 2014 ternyata mengalami pasang surut.

Pada awal berdirinya Kelompok Mandiri Sejahtera belum banyak mendapatkan simpati dari anggota, tapi pada akhir desember 2015 mulai tumbuh kembali dan memberikan penyempurnaan sehingga pada saat itu anggota Kelompok Mandiri Sejahtera mulai banyak. Menurut ketua Kelompok Mandiri Sejahtera pada saat itu modal Kelompok Mandiri Sejahtera hanya 18.235.000 yang mana anggota Kelompok Mandiri Sejahtera mencapai 65 orang. Dengan modal yang ada ini masih belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan anggota yang ada, untuk itu perlu dilakukan beberapa terobosan yaitu dengan mengingatkan para iuaran wajib dan juga para meminjam dana untuk segera membayar tepat waktu.

#### **b. Melakukan Budidaya Ikan Nila dan Ikan Lele**

Meski belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan yang diberikan oleh Kelompok Mandiri Sejahtera kepada anggota dan masyarakat luas, namun Kelompok Mandiri Sejahtera telah berupaya memberikan kesejahteraan kepada

anggota dengan bersama-sama belajar memproduksi budidaya ikan. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Pauzi Hasan selaku ketua adat Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

Kami membangun 8 kolam untuk budidaya ikan, ini hasil dari kerjasama seluruh anggota dan juga pengurus Kelompok Mandiri Sejahtera. Untuk ikan kami budidaya ikan lele dan patin, untuk budidayanya kalau lele kita 3-4/4 bulan sekali dan patin terkadang 6/7 bulansekali, kami mengantarnya ke rumah makan di beberapa desa atau kami jual di pasar. Alhamdulillah untungnya bisa jadi saldo Kelompok Mandiri Sejahtera.<sup>92</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, ikan yang dibudidayakan oleh Kelompok Mandiri Sejahtera yaitu ikan lele dan patin dimana masa panen ikan lele kira- kira 3 bulan sekali sedangkan untuk ikan patin setiap 6 bulan sekali. Kegiatan di bidang perikanan ini merupakan kerjasama antara Kelompok Mandiri Sejahtera dengan Ibu Raudatul Aulia selaku pengurus lembaga adat dan juga alumni Universitas Unja jurusan pertanian. Dia sebagai salah satu konsultan budidaya ikan di Kelompok Mandiri Sejahtera. Dalam mengembangkan ilmunya di Kelompok Mandiri Sejahtera, dia tidak pernah mengharap imbalan karena dia bertujuan untuk membantu perkembangan Kelompok Mandiri Sejahtera agar mampu mensejahterakan masyarakat di dengan Bapak Suherman, selaku Masyarakat Desa Bram Itam Kanan yang dilakukan Kelompok Mandiri Sejahtera telah cukup memberi dampak positif karena masyarakat lain bisa membudidaya sendiri di rumah, sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara sebsamanya sebagai berikut:

Usaha yang dilakukan Kelompok Mandiri Sejahtera telah memberikan contoh bagi anggota yang lain untuk memulai usaha sendiri dirumah mereka

<sup>92</sup>Wawancara dengan Pauzi Hasan selaku ketua adat Desa Bram Itam Kanan, 22 September 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



masing-masing, karena itu nanti bisa membantu mereka dalam menghasilkan uang dari penjualan budidaya ikan lele. Saya juga bekerja di bagian perawatan kolam di Kelompok Mandiri Sejahtera dan saya juga banyak belajar dari sana<sup>93</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, Kelompok Mandiri Sejahtera yang bergerak dalam berbagai usaha atau biasa dikenal dengan sebutan Kelompok Mandiri Sejahtera ini dapat menambah pemasukan kas Kelompok Mandiri Sejahtera, sehingga modal Kelompok Mandiri Sejahtera dapat bertambah. Usaha-usaha inilah yang membantu Kelompok Mandiri Sejahtera ini mendapatkan tambahan modal sehingga, Kelompok Mandiri Sejahtera ini memiliki modal tambahan yang nantinya dapat berguna sebagai modal cadangan atau modal simpanan, yang dapat digunakan atau untuk mengantisipasi apabila dalam kegiatan Kelompok Mandiri Sejahtera mengalami kekurangan.

## **B. Pembangunan Desa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bram Itam Kanan Perspektif Ekonomi Islam**

Berdasarkan surat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

<sup>93</sup>Wawancara dengan Bapak Suherman, selaku Masyarakat Desa Bram Itam Kanan, 04 September 20198.



Adanya pembangunan infrastruktur dalam Islam memiliki dampak yang positif dan kemaslahatan dalam segi ekonomi maupun sosial. Pembangunan infrastruktur desa yang berdampak pada perekonomian masyarakat desa baik dalam segi melakukan pekerjaan dan berdagang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam ekonomi Islam motif dalam aktifitas ekonomi adalah beribadah inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku aktifitas dalam melakukan konsumsi, produksi, dan interaksi ekonomi lainnya.

Apabila masyarakat merasakan dampak dari pembangunan yang membuat perekonomian masyarakat menjadi meningkat, artinya pembangunan tersebut mengalami dampak yang positif serta menjadikan masyarakat sejahtera, dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan adanya rasa aman baik dari segi perasaan, lingkungan, dan juga materi. Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan.

Berdasarkan teori diatas, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat Desa Bram Itam Kanan untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Pemerintah Desa Bram Itam Kanan sangat terbantu dengan adanya dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta berjalannya program pemberdayaan masyarakat. Dalam wawancara dengan Bapak M. Ishak selaku Kaur Perencanaan, mengatakan bahwa:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dengan adanya program pembangunan desa menggunakan dana desa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bram Itam Kanan, pemerintah desa mengajak dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan agar bisa ditingkatkan dari berbagai elemen, baik itu pemberdayaan kependudukannya, kesejahteraannya, perempuannya, dan sebagainya, alhamdulillah sedikit-sedikit kita tingkatkan. Contohnya adalah peningkatan sarana transportasi, peningkatan sarana kesehatan (puskesmas dan posyandu), peningkatan sarana keamanan (menghidupkan kembali siskamling), peningkatan sarana ibadah, mengadakan pelatihan-pelatihan (seperti membuat batik, menciptakan inovasi kuliner baru, dll) serta memberikan penyuluhan dan mengoptimalkan kelompok petani tambak, nelayan dan pembudidayaan.<sup>94</sup>

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa pemerintah desa Tambakbulusan berupaya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah bagi pemerintahan desa yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan amanah dengan merangkul semua pihak dalam pemberdayaan dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat mandiri, memiliki keterampilan serta kreatif dan berkompeten. Dalam pembangunan sarana dan prasana desa dibangun bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, serta perekonomian. Dalam Surat Al-Qashash ayat 77 yang menjelaskan:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Berdasarkan ayat tersebut kandungan yang sangat jelas bahwa kewajiban seorang muslim dan manusia untuk selalu berusaha sekuat tenaga dan fikiran

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ishak selaku Kaur perencanaan, 04 September 2019.

untuk memperoleh harta dan mencari harta tersebut dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Manusia berkewajiban untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam mencari, menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di muka bumi, karena dalam ayat Al- Qashash telah disebutkan Allah tidak merubah suatu kaum melainkan hambanya yang merubah. Artinya Allah telah membukakkan jalan untuk masyarakatnya dalam menggunakan potensi dan kemampuannya dalam pemberdayaan, tergantung kepada masyarakatnya dapat menggunakan program yang telah ada atau tidak.

Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa azas, pondasi dan prinsip sebagai pilar ekonomi Islam. Prinsip merupakan pokok dasar seseorang untuk berfikir atau bertindak berdasarkan azas tertentu. Kaitan antara azas dengan ekonomi Islam adalah cara berfikir dan bertindak secara ekonomi dengan menggunakan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis di lapangan dapat diketahui bahwa pembangunan Desa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bram Itam Kanan telah sesuai dengan Ekonomi Islam diakrenakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pada pembangunan desa seharusnya menerapkan beberapa prinsip ekonomi Islam sesuai dengan teori Ifdlolul Maghfur, antarlain:

### 1. Prinsip Tauhid

Tauhid sebagai prinsip pertama dalam ekonomi Islam, prinsip tauhid harus dimiliki oleh manusia karena didalamnya terdapat aturan serta hukum dalam

pembangunan dan perekonomian. Tauhid merupakan panduan bagi setiap orang Islam dalam melangkah sehingga aktivitas duniawi tidak hanya berorientasi untuk mencari materi saja, namun juga memiliki nilai tambah berupa kemenangan dan kebahagiaan (*falah*) diakhirat.

Berdasarkan teori diatas prinsip tauhid yang ditanamkan kepada masyarakat Desa Bram Itam Kanan yaitu ketika pembangunan sarana tempat ibadah dengan motif dalam aktifitas ekonomi adalah beribadah inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku aktifitas dalam melakukan konsumsi, produksi, dan interaksi ekonomi lainnya. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

Pembangunan yang dilakukan adalah jalan desa dan juga tempat ibadah seperti membantu pembangunan masjid dan mushola dengan swadaya masyarakat. Tujuannya adalah bukan lain dan bukan tidak adalah untuk membuat masyarakat lebih meningkatkan ibadah mereka dengan membuat beberapa fasilitas yang memadai.<sup>95</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat di simpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan untuk selalu meningkatkan ibadah masyarakat yang ada di suatu desa dengan cara membantu pembangunan masjid dan sejumlah fasilitas yang berkaitan dengan itu. Dapat membuat masyarakat di sana lebih lebih mendekatkan diri mereka kepada tuhan nya.

Apabila masyarakat merasakan dampak dari pembangunan yang membuat perekonomian masyarakat menjadi meningkat, artinya pembangunan tersebut mengalami dampak yang positif serta menjadikan masyarakat sejahtera, dalam

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, 27 September 2019.

ekonomi Islam kesejahteraan merupakan adanya rasa aman baik dari segi perasaan, lingkungan, dan juga materi. Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

Dengan adanya pembangunan desa yang semakin membaik dapat memperlancar perekonomian desa. Sebelum melakukan pentingnya selalu mendiskusikan dengan cara musyawarah dengan desa. Apa-apa saja yang ingin di bangun. Dan dengan musyawarah desa dengan masyarakat dapat menentukan apa saja yang harus di bangun. Tentu juga mempunyai manfaat bagi bersama.<sup>96</sup>

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, demi meningkatkan suatu perekonomian suatu perdesaan perlunya musyawarah yang rutin dengan masyarakat. Dengan melakukan perundingan dapat juga membantu menentukan apa saja memiliki nilai bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi di suatu desa.

Berdasarkan teori diatas, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat Desa Bram Itam Kanan untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Pemerintah Desa Bram Itam Kanan sangat terbantu dengan adanya dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta berjalannya program pemberdayaan masyarakat. Dalam wawancara dengan Bapak M. Ishak selaku Kaur Perencanaan, mengatakan bahwa:

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, 27 September 2019.

Dengan adanya program pembangunan desa menggunakan dana desa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bram Itam Kanan, pemerintah desa mengajak dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan agar bisa ditingkatkan dari berbagai elemen, baik itu pemberdayaan kependudukannya, kesejahteraannya, perempuannya, dan sebagainya, alhamdulillah sedikit-sedikit kita tingkatkan. Contohnya adalah peningkatan sarana transportasi, peningkatan sarana kesehatan (puskesmas dan posyandu), peningkatan sarana keamanan (menghidupkan kembali siskamling), peningkatan sarana ibadah, mengadakan pelatihan-pelatihan (seperti membuat batik, menciptakan inovasi kuliner baru, dll) serta memberikan penyuluhan dan mengoptimalkan kelompok petani tambak, nelayan dan pembudidayaan.<sup>97</sup>

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa pemerintah desa Tambakbulusan berupaya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah bagi pemerintahan desa yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan amanah dengan merangkul semua pihak dalam pemberdayaan dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat mandiri, memiliki keterampilan serta kreatif dan berkompeten. Dalam pembangunan sarana dan prasarana desa dibangun bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, serta perekonomian. Dalam Surat Al-Qashash ayat 77 yang menjelaskan:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Berdasarkan ayat tersebut kandungan yang sangat jelas bahwa kewajiban seorang muslim dan manusia untuk selalu berusaha sekuat tenaga dan fikiran untuk memperoleh harta dan mencari harta tersebut dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Manusia

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ishak selaku Kaur perencanaan, 04 September 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



berkewajiban untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam mencari, menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di muka bumi, karena dalam ayat Al- Qashash telah disebutkan Allah tidak merubah suatu kaum melainkan hambanya yang merubah. Artinya Allah telah membukakkan jalan untuk masyarakatnya dalam menggunakan potensi dan kemampuannya dalam pemberdayaan, tergantung kepada masyarakatnya dapat menggunakan program yang telah ada atau tidak.

Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa azas, pondasi dan prinsip sebagai pilar ekonomi Islam. Prinsip merupakan pokok dasar seseorang untuk berfikir atau bertindak berdasarkan azas tertentu. Kaitan antara azas dengan ekonomi Islam adalah cara berfikir dan bertindak secara ekonomi dengan menggunakan nilai-nilai Islam. Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pada pembangunan desa seharusnya menerapkan beberapa prinsip ekonomi Islam

## 2. Prinsip Nubuwah

Menurut Adiwarman prinsip nubuwah mengajarkan kepada umat Islam untuk senantiasa meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat yang diturunkan Allah kepada Nabi yaitu sifat Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah.

Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Saiful Rohman selaku Kepala Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

Dalam membangun desa kita harus sesuai dengan hasil rapat dan yang sudah diamanahkan masyarakat untuk membangun kita lakukan pembangunan dengan baik. Tujuan pembangun adalah tentu saja untuk meningkat daya ekonomi di desa. Dalam sistem pembangunan perlunya amanah dalam pembangunan. Sebelum melakukan perlunya melakukan musyawarah,

dengan musyawarah bisa membuat pembangunan jadi lebih dan terencana dengan baik. Dan juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>98</sup>

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, dalam pembanguana haruslah di amanah dengan baik. Perlunya melakukan perundingan dengan masyarakat dengan baik-baik. Agar pembangunan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan juga harus mengantisipasi terjadinya pembangunan yang tidak bermanfaat dan hal yang tidak terjadi hal-hal buruk lainnya juga. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Saiful Rohman selaku Kepala Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

Sejauh ini pemerintah desa telah membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat bersama di sini, karena pembangunan disini dilakukan dengan musyawarah sesuai dengan syariat islam dan cerita nabi pada zaman dahulu. Jadi mereka tahu apa saja yang mereka butuhkan. Tidak semena mena asal membangun saja tanpa memiliki manfaat.<sup>99</sup>

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, dalam hal pembangunan yang paling terpenting adalah membangun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak asal membangun sesuatu yang memiliki manfaat dalam pembangunan tersebut. pentingnya musyawarah dan perencanaan yang matang dalam hal pembangunan ini. Tentu juga pembangunan itu harus sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Adiwarmn, dalam praktiknya pemerintah Desa Bram Itam Kanan berupaya mempertanggungjawabkan apa

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, 27 September 2019.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, 27 September 2019.

yang menjadi amanah bagi pemerintah desa yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan amanah dengan merangkul semua pihak dalam pembangunan desa.

### 3. Prinsip Kepemilikan

Prinsip dasar kepemilikan menurut ekonomi Islam:

- a. Pemilik bukanlah penguasa mutlak atas sumber daya alam yang tersedia, tetapi pemilik dituntut untuk memanfaatkan sumber daya alam baik untuk dirinya maupun orang lain. Karena apa yang ada di bumi dan dilangit adalah kepemilikan Allah.
- b. Batas kepemilikan manusia hanya pada saat manusia itu hidup didunia.
- c. Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum dan menjadi hajat orang banyak tidak boleh dimiliki secara individu.

Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

Semua fasilitas yang ada di desa menjadi milik masyarakat desa, itu sebabnya kita bangun tempat diskusi atau pendopo agar para pemuda karang taruna dapat berdiskusi di sana. Apapun tentang pembangunan harus lah diketahui dan didiskusiiin bersama. Agar tidak terjadi pembangunan yang bersifat menguntungkan satu pihak dan bukan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>100</sup>

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, semua fasilitas dalam hal pembangunan itu haruslah diketahui oleh sejumlah perangkat desa dan dengan masyarakat juga. Di karenakan tidak ingin pembangunan yang tidak jelas tujuan dan arahnya. Dan juga untuk menghindari pembangunan yang bersifat menguntungkan diri pribadi. Itulah tidak boleh dilakukan menurut islam.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, 27 September 2019.

Berdasarkan prinsip dasar kepemilikan menurut ekonomi Islam, di dalam praktiknya pemerintah Desa Bram Itam Kanan memanfaatkan dan bukan menguasai secara mutlak dana desa melainkan digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana agar masyarakat dapat menjadi lebih baik secara perekonomian dan kualitas hidup. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

Kami membangun sarana olahraga demi kepentingan bersama di tanah R desa, kami memanfaatkan tanah R desa agar bisa menjadi milik bersama baik pemuda dan orang tua kami juga memanfaatkan tanah R tersebut untuk membangun beberapa fasilitas yang bermanfaat bagi desa. Seperti membangun fasilitas olahraga seperti GOR Multifungsi, membuat lapangan voli. Itu bisa digunakan masyarakat untuk meningkatkan dalam hal kegiatan berolahraga.<sup>101</sup>

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, dalam hal pembangunan desa pastilah terdapat Tanah R, tanah tersebut digunakan untuk membangun beberapa fasilitas yang tentu saja memiliki manfaat bagi masyarakat banyak. Seperti membangun GOR Multifungsi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan dalam hal kegiatan meningkatkan kebugaran dan kesehatan.

Berdasarkan prinsip dasar kepemilikan menurut ekonomi Islam, di dalam praktiknya pemerintah Desa Bram Itam Kanan memanfaatkan dan bukan menguasai secara mutlak dana desa melainkan digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana agar masyarakat dapat menjadi lebih baik secara perekonomian dan kualitas hidup.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, 27 September 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



#### 4. Prinsip Keseimbangan

Konsep keseimbangan yang tidak hanya mengukur kebaikan dari hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkaitan juga tentang kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara antara keseimbangan antara hak dan kewajiban dan kewajiban yang harus terealisasi. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

Dalam menentukan pembangunan selalu dilakukan dengan musyawarah agar mendapatkan hasil yang baik. Musyawarah adalah satu cara yang penting dan efektif dalam memecahkan banyak hal. Perlunya melakukan musyawarah yang rutin setiap kali mau merencanakan pembangunan. Karena telah banyak kejadian di desa tanpa musyawarah. Pembangunan bersifat menguntungkan pribadi.<sup>102</sup>

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, musyawarah adalah salah satu jalan yang paling efektif untuk menghindari pembangunan yang tidak jelas tujuannya. Dan juga untuk menghindari pembangunan yang tidak merata dan juga pembangunan yang hanya untuk kepentingan pribadi. Maka dari itulah perlunya musyawarah terus menerus untuk pembangunan lebih baik.

Dalam wawancara dengan bapak M. Nafiul Mutaqin sebagai selaku Kasi Kesejahteraan berpendapat bahwa pemerintah Desa Bram Itam Kanan pada pengelolaan dana desa bersama masyarakat dan lembaga yang ada selalu bermusyawarah dalam menentukan arah pembangunan dan pemberdayaan melalui program dana desa. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, 27 September 2019.

Bapak M. Nafiul Mutaqiin selaku Kasi Kesejahteraan di Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

Dana desa telah dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat di sini, semua dibangun berdasarkan hasil musyawarah bersama. Tidak ada cara yang lain yang bisa mendapatkan pembangunan yang baik tanpa musyawarah. Dengan musyawarah dapat membuat lebih merata dan juga terencana dengan baik. Karena pembangunan harus punya manfaat yang baik masyarakat.<sup>103</sup>

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, pembangunan haruslah bisa memebuhi kebutuhan dalam masyarakat. Harus tahu juga dari pembangunan tersebut memiliki banyak manfaat bagi sesama. Tidak boleh ada kata pembangunan yang tidak merata dan bersifat mengambil keuntungan secara pribadi. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara berdasar pada teori diatas menunjukkan bahwa konsep kesimbangan pada pengelolaan di Desa Bram Itam Kanan telah terealisasi dilihat dari pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Desa Bram Itam Kanan .

## 5. Prinsip Keadilan

Dari wawancara dengan bapak Muslih selaku masyarakat Desa Bram Itam Kanan mengatakan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah desa berdasar dari kesepakatan bersama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dari usulan-usulan yang diambil dari perwakilan setiap RT atau dusun yang berpartisipasi pada musyawarah desa. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Muslih selaku masyarakat Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak M. Nafiul Mutaqiin selaku Kasi Kesejahteraan di Desa Bram Itam Kanan, 23 September 2019.



Pembangunan di sini sesuai dengan kebutuhan agar ekonomi dan roda pemerintahan berjalannya lancar, semuanya harus dilakukan dengan baik. Kebutuhan ekonomi juga sangat penting. Perlunya peningkatan ekonomi haruslah diimbangi oleh pembangunan yang baik pula tentunya. Dengan pembangunan yang merata dapat meningkatkan ekonomi bagi masyarakat.<sup>104</sup>

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi, haruslah ada pembangunan yang baik dan terencana dengan baik dan juga mempunyai manfaat bagi sesama. Dan juga dapat meningkatkan daya masyarakat dalam mengembangkan setiap usaha mereka. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

Kami mempekerjakan masyarakat yang ada di sini agar mereka merasa terbantu dengan adanya pekerjaan ini. Tentu saja juga dapat membantu masyarakat dan mengajak mereka dalam proses pembangunan desa seperti contoh membuat jalan dan fasilitas lainnya untuk desa. Dan mereka juga mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang mereka kerjakan.<sup>105</sup>

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, dalam hal pembangunan dalam juga harus melibatkan warga dari desa tersebut. Dikarenakan mereka akan dapat penghasilan yang mereka kerjakan, dan juga dapat meningkatkan perekonomian mereka. Contohnya mengajak mereka dalam hal pembangunan desa seperti pembuatan jalan dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan teori dan wawancara yang ada terkait keadilan dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Muslih selaku masyarakat Desa Bram Itam Kanan, 27 September 2019.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, 27 September 2019.

masyarakat sesuai usulan dari perwakilan masyarakat desa. Tetapi pemberdayaan yang dilakukan masih kurang merata, masih terdapat warga yang pekerjaannya serabutan belum mendapatkan pelatihan- pelatihan agar bisa mandiri.

## 6. Prinsip Persaudaraan (*ukhuwah*) dan Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip persaudaraan (*ukuwah*) merupakan identitas sebagai sesama muslim adalah saudara. Sedangkan, dalam prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) merupakan wujud kepedulian terhadap sesama muslim dalam meringkankan bebannya, sehingga dapat terwujud kegiatan ekonomi yang bermanfaat untuk semua pihak.

Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, sebagai berikut:

Kita disini sangat mengedepankan kerjasama atau bergotong-royong agar hasil yang kita inginkan menjadi baik, dalam pembangunan akan meningkatkan ekonomi yang baik bagi masyarakat desa. Dengan melakukan gotong-royong dapat membuat lebih cepat diselesaikan.<sup>106</sup>

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, masyarakat melakukan gotong-royong untuk menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Saling membantu satu sama lain dalam hal pembangunan, dan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat disana.

Dalam kerangka konsep persaudaraan ini, sikap yang baik kepada orang lain bukanlah sebagaimana yang diajarkan ekonomi kapitalisme. Sebuah perjuangan hidup tidak hanya untuk memenuhi kepentingan dan kepuasan individu semata, tetapi juga saling berkorban dan bekerjasama untuk memenuhi

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful Rohman selaku kepala Desa Bram Itam Kanan, 27 September 2019.

kebutuhan primer saudara seiman yang fakir ataupun miskin. Persaudaraan dan saling tolong-menolong berarti pemberdayaan masyarakat memerlukan kebersamaan dan saling tolong-menolong dari mereka yang terlibat dalam pengembangan masyarakat lainnya. Melalui kebersamaan kompleksitas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat akan terasa ringan dan mudah untuk dilaksanakan. Adapun contoh persaudaraan dan saling tolong- menolong dalam pemberdayaan di Desa Bram Itam Kanan yaitu dalam memberikan pelatihan-pelatihan dan pembentukan kelompok tani tidak melihat miskin dan kaya, semua dilatih sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing meskipun pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang merata.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bram Itam Kanan Perspektif Ekonomi Islam dilakukan dengan prinsip tauhid, prinsip nubuwah, prinsip kepemilikan, prinsip keseimbangan, prinsip keadilan dan prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dan tolong-menolong (*ta'awun*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan dilakukannya pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka sebagai penutup penulis akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat lima langkah dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur desa melalui program alokasi dana desa pada Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di antaranya: transparansi pembangunan, di mana masyarakat dapat mengetahui mekanisme pembangunan di Desa Bram Itam Kanan, pertanggungjawaban pembangunan, di mana perangkat desa selalu merespon pembangunan di Desa Bram Itam Kanan; responsibilitas, di mana pekerjaan yang dilakukan berdasarkan keputusan perangkat Desa Bram Itam Kanan; independensi, di mana tidak dipengaruhi oleh desa lain; dan kesetaraan dan kewajaran, di mana memberikan kesamaan hak pembangunan dan pelayanan.
2. Pembangunan desa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bram Itam Kanan Perspektif Ekonomi Islam dilakukan dengan prinsip tauhid, prinsip nubuwah, prinsip kepemilikan, prinsip keseimbangan, prinsip keadilan dan prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dan tolong-menolong (*ta'awun*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran yang dapat diberikan penulis untuk kemajuan Indonesia terutama Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam yakni: Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai masalah-masalah perkembangan perekonomian dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan perekonomian yang lebih baik. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan pihak pemerintah lebih memperhatikan pembangunan perekonomian di pedesaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Badan Ramdan dkk, *Abcd Perencanaan desa Bacaan Khusus Untuk Kaum Perempuan dan Masyarakat Miskin*, Jakarta: Inisiatif, 2014.
- Benyamin Lakitan dkk, *Metode Penelitian*, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 1998.
- D.C. Korten dan Sjahrir, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Djuni Pristianto, *Panduan Penyusunan RPJM desa*, Jakarta: Yayasan Penabulu, 2015.
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahannya Q.S. Al-Anfal ayat 53, PT. Syamil Cipta Media, Bandung, 2005.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama: Bandung, 2014.
- Hadi Hatrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002.
- Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: PT. Asdi Mahasaty (cetakan kelima), 2006.
- Kementerian Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Membangun Sarana dan Prasarana Desa*, 2015
- Lutfiah Hanim, "Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Kelurahan Dalam Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah (Studi Di Kelurahan Gadang Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Mutthoriq dkk, "Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 2, No. 3
- Nur Sahida Mohammad dkk, "Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awal", *Jurnal Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VIII*, ISSN: 2231-962X, 2013, h. 362

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015

Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA-LAN, 1998.

Sukasmanto dan Dina Mariana, *Modul Panduan Menyusun Kewenangan dan Perencanaan Desa*, Yogyakarta: IRE Yogyakarta – CCES, 2015.

Syamsi, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Siswa Bimbingan Dan Konsultasi Belajar Al Qolam Bandarlampung”, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 5 Nomor 1, April, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta: Bandung, 2012.

Suhartini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Titis Istikomah, “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui *Entrepreneurship Capacity Buliding*, (ECB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Study Pada Kelompok Tani Kecamatan Talang Padang), skripsi Program Strata 1 IAIN Lampung, 2015.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa

Zulfikri Amanda, “Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, <http://catatanpamong.blogspot.co.id/2014/01/undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang.html>, diakses pada 10 Februari 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## INSTRUMEN WAWANCARA.

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya memperoleh informasi dan data yang obyektif. Peneliti melakukan wawancara kepada pemerintah Desa Bram Itam Kanan

Adapun Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Bram Itam Kanan ?
2. Bagaimana perkembangan yang dicapai Desa Bram Itam Kanan ?
3. Apa Visi dan Misi Desa Bram Itam Kanan ?
4. Bagaimana keadaan struktur organisasi Desa Bram Itam Kanan ?
5. Bagaimana keadaan prangkat desa/pekerja Desa Bram Itam Kanan ?
  - a. Latar belakang pendidikan
  - b. Alamat
  - c. Usaha yang dilakukan untuk peningkatan profesionalisme
6. Bagaimana keadaan penduduk Desa Bram Itam Kanan ?
  - a. Jumlah
  - b. Keadaan
7. Apakah pemerintah Desa Bram Itam Kanan melaksanakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
8. Bagaimana strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program alokasi dana desa pada Desa Bram Itam Kanan, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
9. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pembangunan infrastruktur desa terhadap perekonomian masyarakat Desa Bram Itam Kanan, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
10. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Bram Itam Kanan ?

11. Apa saja faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bram Itam Kanan ?
12. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bram Itam Kanan ?

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DOKUMENTASI



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



### @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



### State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### A. Informasi Diri

Nama : Akbar Saputra Jumsar  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Tempat & Tgl. Lahir : Benteng, 22 April 1996  
 NIM : EES 150580  
 Alamat : Jl. Perum Hamsari Kel. Simpang IV Sipin  
 No. Telp/HP : 085357525595  
 Email : abay12kpb@gmail.com  
 Nama Ayah : Jumring  
 Nama Ibu : Saripah

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI DDI Pulau Kijang : Tahun 2009
2. MTs DDI Pulau Kijang : Tahun 2012
3. SMA Negeri 1 Reteh : Tahun 2015

### C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Bidang Humas, Sosial dan Kerjasama HMJ Ekonomi Syariah Periode 2017-2018
2. Ketua II Bidang Eksternal PMII Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam Komisariat UIN STS Jambi periode 2018-2019
3. Koordinator Bidang Promosi Kader BPH IKAMI Sul-Sel cab. Jambi periode 2016-2017.
4. Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi BPH IPMR Jambi periode 2017-2019.
5. Sekretaris Umum IPMR Jambi periode 2019-2021.